

Peran BPK  
dalam Mengawal SDGs

Hal 4

BPK Terapkan SAI PMF  
untuk Tingkatkan Kinerja

Hal 13

BPK Bahas Draf Hasil  
*Peer Review* di Polandia

Hal 23



# BPK

Hasil pemeriksaan BPK diharapkan mendorong program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat selaras dengan SDGs.

# KAWAL

# SDGs



■ Anggota II BPK, Agus Joko Pramono

- 3 Dari Redaksi
- 4 Peran BPK dalam Mengawal SDGs
- 7 Kesiapan Pemerintah Mengimplementasikan SDGs
- 10 Indonesia Sampaikan Pencapaian SDGs
- 13 BPK Terapkan SAI PMF untuk Tingkatkan Kinerja
- 16 Peer Review BPK dari Masa ke Masa
- 18 Sejarah SIMDA dan Pemanfaatannya oleh BPK
- 20 Ketua BPK Menghadiri Pertemuan ASOSAI Governing Board Ke-54 di Kuwait City
- 21 Belajar Pengendalian 1,7 Triliun Dolar AS di New York
- 22 Kunjungi BPK, SAO Thailand Jajaki Kerja Sama
- 23 BPK Bahas Draf Hasil *Peer Review* di Polandia
- 24 I Nyoman Wara, Auditor Utama Investigasi BPK Adaptasi Jadi Kunci
- 27 Slamet Soedarsono, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Mustahil Tanpa Akuntabilitas dan Transparansi
- 32 Ekstra Sabar Berbuah Keindahan Sorong
- 34 Bisnis Kurban yang Berawal dari Cinta
- 37 Yuk Gabung dengan Komunitas Foto BPK
- 40 BPK Gelar Seminar Migas
- 41 AKN V dan AKN VI Matangkan Pemeriksaan Kinerja Tematik
- 42 Tahukah Anda Penerapan Manajemen Risiko di BPK?
- 48 Berita Foto



■ Inspektur Utama, Ida Sundari

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu lembaga negara yang dipercaya untuk mengawal pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Hal ini sesuai dengan kesepakatan International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) atau organisasi lembaga pemeriksa sedunia melalui kongres di Abu Dhabi pada 2016 untuk mengawal program SDGs di negara masing-masing.

Di Tanah Air, BPK sejak awal telah dilibatkan dalam merumuskan konsep dan tahapan pemeriksaan SDGs. Beberapa langkah yang dilakukan BPK antara lain, melakukan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah pada semester I 2018 dalam menjalankan program SDGs. Pemeriksaan pada intinya bertujuan mengetahui sejauh mana persiapan pemerintah setelah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Terkait dengan hal itu, maka SDGs menjadi tema utama *Warta Pemeriksa* edisi Agustus 2019. Pada edisi kali ini, kami menyajikan liputan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengan SDGs di Indonesia.

Dalam rubrik Sorotan, misalnya, redaksi menurunkan laporan mengenai peran BPK dalam mengawal SDGs. Di sini dilaporkan mengenai kegiatan Anggota II BPK Agus Joko Pramono di High Level Political Forum on Sustainable Development Goals (HLPF on SDGs) pada 15-16 Juli 2019 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat.

Pada tahun ini, terdapat 47 negara yang menyerahkan dan mempresentasikan laporan Voluntary National Reviews (VNR) atas pelaksanaan SDGs di negara mereka. Tujuh negara di antaranya, termasuk Indonesia, menyampaikan VNR mereka yang kedua. Dalam HLPF tersebut, BPK RI mendapat kesempatan untuk menjadi pembicara dalam salah satu Side Event yang diadakan, yaitu di VNR Lab 10 dengan topik "Engaging All Parts and Levels of Government."

Rubrik Sorotan juga berbicara mengenai kesiapan pemerintah mengimplementasikan SDGs. Beberapa poin yang redaksi paparkan adalah capaian-capaian pemerintah yang telah menunjukkan kemampuan untuk menyusun kerangka kerja yang baik tercermin pada tiga area, yaitu kebijakan; sarana pelaksanaan; serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Sementara pada rubrik BPK Bekerja, redaksi menurunkan laporan mengenai upaya BPK yang menerapkan Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF) atau Kerangka Pengukuran Kinerja Lembaga Pemeriksa untuk meningkatkan kinerja.

Menyambut Idul Adha, kami juga menyajikan liputan mengenai bisnis hewan kurban di rubrik Bisnis dan Niaga. Dalam laporan ini, Sarjono, pegawai auditorat keuangan negara (AKN) I BPK berbagi cerita mengenai pengalamannya jatuh bangun menjalankan bisnis hewan kurban.

Jangan lupa untuk membaca rubrik Komunitas yang mengangkat cerita pegawai BPK yang menjalankan hobi di bidang fotografi. Akhir kata, redaksi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah dan Dirgahayu Republik Indonesia. ●

## Tim Editorial

### Pengarah

Moermahadi Soerja Djanegara  
Bahrullah Akbar  
Bahtiar Arif

### Penanggung Jawab

Juska Meidy Enyke Sjam

### Supervisi Penerbitan

Gunarwanto

### Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

### Redaksi

Bidramnanta  
Iqra Fiqh  
Yudha Bayangkara  
Radiansyah Said  
Arif Rahman Hakim  
Ren Jingga

### Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

### Sekretariat

Bestantia Indraswati  
Klara Ransingin  
Reza Hadi Satria  
Ridha Sukma  
Sudarman

### Sekretariat

Gedung BPK-RI  
Jalan Gatot Subroto no 31  
Jakarta  
Telepon: 021-25549000  
Pesawat 1188/1187  
Faksimili: 021-57854096  
Email: wartabpkri@gmail.com  
[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Jenderal  
Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia

# Peran BPK dalam Mengawal SDGs

BPK saat ini sedang melakukan pemeriksaan atas tahap implementasi SDGs. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu SAI yang bergerak cepat menjalani tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati INTOSAI.

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) atau organisasi lembaga pemeriksa sedunia melalui kongres di Abu Dhabi pada 2016 sepakat mengawal program Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di negara masing-masing. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu SAI (lembaga pemeriksa) yang menghadiri kongres tersebut dan berkomitmen mengawal SDGs di Tanah Air.

SDGs mengamanatkan 17 tujuan dengan 169 capaian. Beberapa tujuan di antaranya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, hingga mengatasi perubahan iklim. Pada prinsipnya, konsep pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan tiga aspek: lingkungan, sosial, dan ekonomi.

BPK sejak awal bahkan dilibatkan dalam merumuskan konsep dan tahapan pemeriksaan SDGs. INTOSAI kemudian menyepakati empat pendekatan dalam pemeriksaan SDGs. Pertama, melakukan pemeriksaan terhadap *preparedness* atau persiapan suatu negara untuk menjalankan program SDGs. Kedua, memeriksa kinerja terhadap pelaksanaan program. Ketiga, memeriksa implementasi program dari sisi transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Terakhir, menetapkan *role model* dalam penerapan SDGs di organisasi masing-masing.

BPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah pada semester I 2018 dalam menjalankan program SDGs. Pemeriksaan pada intinya bertujuan menge-

etahui sejauh mana persiapan pemerintah setelah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Hasil pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah Indonesia menjalankan SDGs juga telah disampaikan BPK dalam acara High Level Political Forum on Sustainable Development Goals (HLPF on SDGs) pada 15-16 Juli 2019 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat. HLPF merupakan forum yang memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota PBB untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam mereview dan menindaklanjuti agenda SDGs 2030.

Pada tahun ini, terdapat 47 negara yang menyerahkan dan mempresentasikan laporan Voluntary National Reviews (VNR) atas pelaksanaan SDGs di negara mereka. Tujuh negara di antaranya, termasuk Indonesia, menyampaikan VNR mereka yang kedua.

Dalam HLPF tersebut, BPK RI mendapat kesempatan untuk menjadi pembicara dalam salah satu *Side Event* yang diadakan, yaitu di VNR Lab 10 dengan topik "Engaging All Parts and Levels of Government."

Anggota II BPK Agus Joko Pramono dalam presentasinya menekankan pentingnya kesatuan data dan penggunaan sumber daya yang efektif sebagai salah satu syarat berhasilnya pencapaian SDGs. BPK RI berperan mengawal pelaksanaan SDGs di Indonesia dengan kegiatan audit yang dilakukannya.

"Salah satu rekomendasi BPK atas kesiapan



Salah satu rekomendasi BPK atas kesiapan SDGs Indonesia tahun lalu telah dilakukan Pemerintah RI dengan menerbitkan Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada tanggal 12 Juni 2019 lalu.



■ Anggota II BPK menjadi narasumber pada *SAI Leadership and Stakeholders Meeting* di Kantor Pusat PBB New York, 23 Juli 2019.

SDGs Indonesia tahun lalu telah dilakukan Pemerintah RI dengan menerbitkan Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada tanggal 12 Juni 2019 lalu," kata Agus.

Selain itu, Agus menyatakan bahwa BPK ke depannya tidak hanya akan menilai *output* dalam pemeriksaan SDGs di Indonesia, tetapi juga *outcome*.

Anggota II juga menghadiri *SAI Leadership and Stakeholders Meeting* di kantor pusat PBB, New York, akhir Juli. Dalam kesempatan tersebut, Agus berbagi pandangan tentang pengembangan model audit implementasi SDGs dengan 240 Auditor dari seluruh dunia.

Ia menjelaskan, tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 tahunan.

Selain itu, diperlukan adanya pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang komprehensif. Salah satu terobosan yang dilakukan BPK adalah dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan terkini tentang SDGs di setiap level, UN DESA di level global, UN ESCAP di level regional, UNDP Indonesia di level nasional, dan SDGs center yang ada di beberapa universitas di Indonesia.

Dalam hal penggunaan teknolo-

gi, BPK menjadi salah satu SAI yang konsisten melakukan inovasi-inovasi terkait teknik pemilihan sampel. Dalam kesempatan ini, BPK memberikan contoh bahwa dalam audit SDGs *preparedness*, BPK menggunakan GIS dan Gephi untuk membantu pelaksanaan audit dalam memperdalam akar masalah dengan menggunakan GIS untuk menentukan sampel yang tepat dan menggunakan *network analysis* untuk membuktikan hipotesa tentang realisasi belanja yang masih perlu diperbaiki dalam hal kualitasnya.

BPK saat ini sedang melakukan pemeriksaan atas tahap implementasi SDGs. Hal ini menjadikan BPK salah satu SAI yang telah bergerak maju terkait tahapan audit SDGs yang disepakati dalam rencana strategis INTOSAI. Sebagai salah satu SAI yang dianggap dapat menjadi *benchmark*, UN DESA kemudian meminta Anggota II untuk memberikan kesan dan pesan atas inisiatif kegiatan *SAI Leadership and Stakeholders Meeting* ini.

Pemeriksa Muda Auditorat Utama Keuangan Negara II Tjokorda Gde Budi Kusuma saat berbincang dengan *Warta Pemeriksa* menjelaskan, salah satu hal yang disoroti BPK saat melakukan pemeriksaan persiapan pelaksanaan program SDGs di Indonesia adalah terkait data. BPK, kata dia, melihat bahwa kementerian dan lembaga masih memiliki egosektoral yang tinggi. Setiap kementerian memiliki surveinya sendiri. "Intinya terkait data, masih banyak *resource* data yang sebenarnya mampu

dikumpulkan menjadi satu data," kata Tjokorda.

BPK kemudian mendorong agar pembahasan Perpres Satu Data segera ditetapkan. "Dan pada akhirnya Perpres Satu Data itu ditetapkan oleh Presiden."

Tjokorda mengatakan, Perpres Satu Data sangat penting. Selain dapat menghemat anggaran karena kementerian tak lagi melakukan survei, Satu Data dapat mempermudah proses pemeriksaan oleh BPK. "Jadi saat pelaksanaan survei itu jelas, metadatanya bisa jadi kesimpulan nasional," kata dia.

Selain mengenai data, BPK juga menyoroti kurang dilibatkannya lembaga filantropi dan perusahaan swasta dalam mengejar target SDGs.

"SDGs ini sifatnya *multistakeholder*. Kalau hanya pemerintah yang hanya mengurus pembangunan, maka akan kurang maksimal," ujarnya.

Saat ini, BPK sedang bersiap melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program SDGs. Pada intinya, kata Tjokorda, pemeriksaan itu bertujuan mengetahui sejauh mana program-program yang dijalankan pemerintah berkontribusi terhadap capaian-capaian target SDGs.

"Yang menjadi tantangan adalah karena implementasi SDGs, kriterianya ternyata di level *outcome*. Jadi kalau biasanya di level *output*, bisa cepat kita lihat langsung *output*-nya seperti apa. Karena ini level *outcome*, perlu metodologi pemeriksaan tersendiri," kata dia.

Ia menjelaskan, BPK saat ini mulai melihat beberapa hal terkait implementasi program SDGs oleh pemerintah. Beberapa di antaranya mengenai implementasi di bidang pendidikan, upaya pemerintah mengurangi kesenjangan, hingga persoalan tenaga kerja.

“Karena memang tema evaluasi tahun ini di level PBB itu kaitannya dengan VNR (Voluntary National Review) 2019 yang dilaporkan ke PBB dari Indonesia. Ada beberapa *goals* yang di-highlight di sana, yaitu *goals* 4 soal pendidikan, *goals* 8 mengenai *decent work and economic growth*, hingga *goals* 10 tentang *equality*,” ujar dia.

Setelah melakukan pemeriksaan persiapan dan implementasi program, BPK akan melakukan pemeriksaan dari sisi transparansi, akuntabilitas, dan



Yang menjadi tantangan adalah karena implementasi SDGs, kriterianya ternyata di level *outcome*. Jadi kalau biasanya di level *output*, bisa cepat kita lihat langsung *output*-nya seperti apa. Karena ini level *outcome*, perlu metodologi pemeriksaan tersendiri.

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kata Tjokorda, pendekatan ketiga dalam proses pemeriksaan SDGs itu erat kaitannya dengan *goals* 16 SDGs.

“Goals 16 ini menjadi darah BPK,

dalam artian kegiatan sehari-hari BPK bagaimana mengawal agar penggunaan dana publik itu akuntabel dan transparan di semua level pemerintahan. Itu tantangan yang akan berjalan di semester II ini,” katanya. ●

## Sejumlah Hasil Pemeriksaan BPK yang Berkaitan dengan SDGs

### 1. Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan PIP (Program Indonesia Pintar)

#### A. Beberapa permasalahan

- Penetapan dan pengalokasian jumlah dana BOS belum akurat
- Alokasi pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui PIP belum sepenuhnya sesuai kebutuhan.
- Penetapan dan penyaluran dana BOS belum sepenuhnya dilaksanakan tepat waktu.
- Bantuan PIP belum sepenuhnya diterima oleh peserta didik untuk memenuhi biaya personal pada saat dibutuhkan.
- Penggunaan dana BOS belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan sasaran.

#### B. Beberapa rekomendasi untuk Mendikbud

- Menetapkan satuan biaya dana BOS dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah serta indikator ekonomi lainnya.
- Menginstruksikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) agar menyusun kajian dan merumuskan pedoman tentang perhitungan *unit cost* kebutuhan PIP dalam klaster tertentu dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah dan indikator ekonomi lainnya. ●

### 2. Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. (Tahun 2017-Semester I 2018. Obyek pemeriksaan Kementerian Kesehatan)

#### A. Beberapa permasalahan

- Pengalokasian DAK Bidang Kesehatan oleh Kemenkes belum sepenuhnya mendukung ketersediaan dan pemerataan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA).
- Kemenkes belum sepenuhnya memiliki regulasi yang mendukung pemerataan dokter dan tenaga kesehatan (DTK).

#### B. Rekomendasi untuk Menkes

- Memerintahkan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk menyelaraskan definisi operasional pada satuan kerja terkait dengan Renstra Kemenkes.
- Menginstruksikan Sekretaris Jenderal, Dirjen Pelayanan Kesehatan, dan Inspektur Jenderal untuk melakukan pengalokasian DAK sesuai dengan ketentuan perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan yang berlaku, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi SPA yang diadakan melalui DAK bidang kesehatan. ●

Sumber: IHPS II 2018

# Kesiapan Pemerintah Mengimplementasikan SDGs

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa upaya kesiapan pemerintah dalam implementasi SDGs di Indonesia telah cukup efektif. Namun demikian, masih ditemukan hal-hal yang menghambat implementasi SDGs.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemeriksaan kinerja tersebut telah disampaikan kepada pemerintah dan dicantumkan ke dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018.

Pemeriksaan dilakukan pada 2016-semester I tahun 2018 dengan objek pemeriksaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan tersebut bertujuan menilai efektivitas upaya pemerintah dalam kesiapan implementasi SDGs di Indonesia, yang meliputi upaya untuk mengadopsi SDGs dalam konteks nasional, upaya untuk menyediakan sumber daya pendukung kebijakan secara berkecukupan dan berkelanjutan, serta upaya untuk membentuk basis data indikator SDGs yang akan digunakan dalam proses *follow up* dan *review* capaian pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Capaian-capaian pemerintah yang telah menunjukkan kemampuan untuk menyusun kerangka kerja yang baik tercermin pada 3 area, yaitu kebijakan; sarana pelaksanaan; serta *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam hal kebijakan, pemerintah telah melibatkan pemangku kepentingan dalam rangka integrasi SDGs ke dalam konteks nasional, menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 sebagai bentuk penugasan kepada institusi, serta menyelaraskan 169 target SDGs dengan memilih 94 target yang se-

suai dengan Rencana Nasional Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Terkait sarana pelaksanaan, pemerintah telah mengidentifikasi jumlah besaran kebutuhan dan sumber dana untuk membiayai implementasi, *monitoring*, dan pelaporan SDGs di Indonesia. Selain itu, pemerintah telah memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa anggaran terkait dengan 94 target SDGs yang merupakan prioritas RPJMN, dialokasikan dan dilaporkan dengan akuntabel. Kemudian, pemerintah telah mengidentifikasi kapasitas nonfinansial untuk mendukung implementasi, *monitoring* dan pelaporan SDGs.

Sementara mengenai *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki rancangan untuk menetapkan pembagian tugas untuk memantau, menindaklanjuti, *me-review*, dan melaporkan kemajuan atas implementasi SDGs. Lalu, pemerintah sudah mengidentifikasi indikator kinerja dan *baseline* serta menetapkan *milestones* untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi SDGs.

Pemerintah Indonesia juga diketahui telah menetapkan proses untuk memastikan kualitas, ketersediaan, dan tingkat disagregasi data yang diperlukan. Terakhir, proses *monitoring*, tindak lanjut, *review*, dan pelaporan telah dirancang melalui proses partisipatif dan proses tersebut memunculkan keterlibatan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa upaya kesiapan pemerintah dalam implementasi SDGs di Indonesia telah cukup efektif. Namun demikian, masih ditemukan hal-hal yang menghambat implementasi SDGs. Beberapa hambatan tersebut antara lain:

## 1

Kebijakan pemerintah terkait dengan penganggaran dan belanja yang berkualitas belum memadai. Dari sisi efisiensi belanja, pemerintah telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja (PBK) dalam perencanaan anggaran. Berdasarkan Buku 2 Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, diketahui bahwa ciri utama PBK adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (*input*) dengan hasil yang diharapkan (*outcome*) atau penganggaran berbasis program (*money follow program*), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan.

Ciri utama tersebut belum tercermin dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada. Kondisi tersebut mengakibatkan inefisiensi dan ketidakhematan pada penggunaan belanja pemerintah dalam penyediaan layanan dasar bagi warga negara.

Kondisi tersebut disebabkan beberapa hal:

▶ Belum ada standar belanja yang digunakan untuk menghasilkan suatu keluaran;

▶ Belum ada kebijakan disinsentif alokasi anggaran tahun berikutnya bagi kementerian yang melakukan inefisiensi di tahun berjalan.

## 2

Pemerintah belum dapat menghasilkan disagregasi data yang diperlukan pada tingkat kabupaten/kota. Keberadaan indikator yang valid dan andal, terutama terkait dengan 11 pelayanan dasar, dapat membantu pemerintah memastikan bahwa semua penduduk (termasuk yang paling sulit dijangkau) telah terlayani 11 pelayanan dasar tersebut.

11 pelayanan dasar tersebut ialah kepemilikan akta kelahiran, akses pada pelayanan persalinan yang layak untuk ibu hamil, vaksinasi dasar untuk anak-anak, metode kontrasepsi untuk pasangan menikah pada usia produktif, akses pendidikan dasar dan menengah, akses sumber air layak, akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan, hunian yang layak, dan akses listrik. Ketercapaian atas 11 pelayanan dasar tersebut merupakan bagian dari pencapaian SDGs.

#### HASIL PEMERIKSAAN ATAS DISAGREGASI DATA/INDIKATOR SAMPAI TINGKAT KABUPATEN/KOTA:

▶ Statistik dasar yang diselenggarakan oleh BPS terkait dengan indikator kemiskinan tidak dirancang untuk dapat menyajikan disagregasi 40 persen penduduk berpendapatan terendah sampai level kabupaten/kota.

▶ Desain survei untuk data-data operasional sektoral yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah (pemda) tidak dapat dimanfaatkan untuk data-data pendukung pembentukan indikator 40 persen penduduk berpendapatan terendah.

#### KONDISI TERSEBUT MENAKIBATKAN:

▶ Indikator-indikator yang dihasilkan tidak dapat dijadikan acuan yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam mendorong perbaikan implementasi program-program pemerintah untuk meningkatkan capaian SDGs guna mendukung pembangunan nasional di tingkat pemerintah pusat dan tingkat pemerintah daerah.

▶ Pemanfaatan data statistik (sektoral) dari pusat maupun daerah belum optimal.

▶ *Review* kemajuan implementasi SDGs berpotensi tidak lengkap dan tidak akurat.

▶ Tidak efektifnya evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah karena mengarahkan sumber-sumber daya yang ada, prioritasasi investasi, dan memastikan bahwa pelayanan publik tidak berdasarkan data yang valid.

▶ Inefisiensi anggaran belanja survei yang dilakukan oleh BPS dan kementerian/ lembaga/pemda.





# SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



## KONDISI TERSEBUT DISEBABKAN:

Sistem statistik nasional yang ada belum mampu menempatkan BPS sebagai pusat rujukan informasi statistik nasional yang dapat mengoordinasi seluruh sumber daya statistik yang ada di Indonesia dengan efisien.

Belum ditetapkannya Perpres Satu Data sebagai mekanisme operasional antara BPS dan kementerian lembaga/instansi pemerintah yang memiliki mandat untuk melaksanakan survei.

BPS hanya mampu menyajikan disagregasi indikator 40 persen penduduk berpendapatan terendah di level provinsi.

Sumber data yang digunakan dari kementerian/lembaga sektor tidak valid.

Atas sejumlah permasalahan tersebut, Kementerian PPN/ Bappenas yang mewakili pemerintah memberikan tanggapan bahwa Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu menyatakan sependapat. Pemerintah secara bertahap terus melakukan transformasi sistem perencanaan dan penganggaran melalui penyempurnaan regulasi dan pengembangan aplikasi. BPS juga sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.

## Rekomendasi BPK

Menteri PPN/Kepala Bappenas bekerjasama dengan Kemenkeu untuk penyusunan perpres mengenai penganggaran dan belanja yang berkualitas.

BPS menyempurnakan *draft* Peraturan Presiden mengenai satu data, untuk memastikan bahwa BPS sebagai pusat rujukan statistik memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan seluruh sumber daya statistik di Indonesia dan BPS dapat memperkuat koordinasi antarpelaku statistik dalam penyediaan data statistik sehingga dapat dihasilkan data yang andal dan berkualitas.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas kesiapan implementasi SDGs di Indonesia mengungkapkan 12 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

# Indonesia Sampaikan Pencapaian SDGs

HLPF 2019 menjadi panggung bagi Indonesia untuk berbagi praktik terbaik dengan dunia, termasuk proses implementasi SDGs secara inklusif dengan melibatkan DPR RI, akademisi dan pakar, aktor nonpemerintah lain, serta Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan pemeriksaan SDGs.

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas meluncurkan Voluntary National Review 2019. Ini merupakan kali kedua Bappenas meluncurkan VNR setelah sebelumnya menerbitkan laporan sama pada 2017.

VNR merupakan laporan pencapaian suatu negara atas program Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan. Tema VNR 2019 yang dipublikasikan di the United Nation High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development 2019 adalah 'Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality'.

Tema tersebut berfokus pada ulasan keterkaitan enam *goals* SDGs. Keenam tujuan tersebut adalah Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas, Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan, Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, dan Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

"Meski ketidakpastian global tengah terjadi, Indonesia berhasil menurunkan ketimpangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif, menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan akses pendidikan, mengurangi emisi gas rumah kaca,

dan menguatkan upaya pencegahan, penanganan, dan ketahanan terhadap bencana," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di New York, Amerika Serikat, pertengahan Juli, dalam keterangannya di laman resmi Bappenas, *Bappenas.go.id*.

Bambang mengatakan, Indonesia juga terus berkomitmen mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Salah satu caranya dengan menurunkan Rasio Gini. Per September 2018, Rasio Gini tercatat sebesar 0,384. Kemudian, peningkatan kesempatan kerja dengan penciptaan sepuluh juta lapangan kerja pada 2015-2018, penurunan ketimpangan dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta peningkatan kualitas adaptasi dan mitigasi sumber daya alam, lingkungan, dan perubahan iklim yang signifikan.

Di bidang inklusi sosial, Indonesia telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan pengarusutamaan gender serta alokasi pendanaan dan perencanaan yang sensitif gender. Selain itu, Indonesia mengembangkan sekam pendanaan nontradisional untuk mengimplementasikan TPB/SDGs melalui SDGs Financing Hub yang menjadi kerangka *blended financing*, meliputi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), filantropi berbasis agama, pendanaan hijau, zakat untuk SDGs, juga penggalan dana filantropi digital.

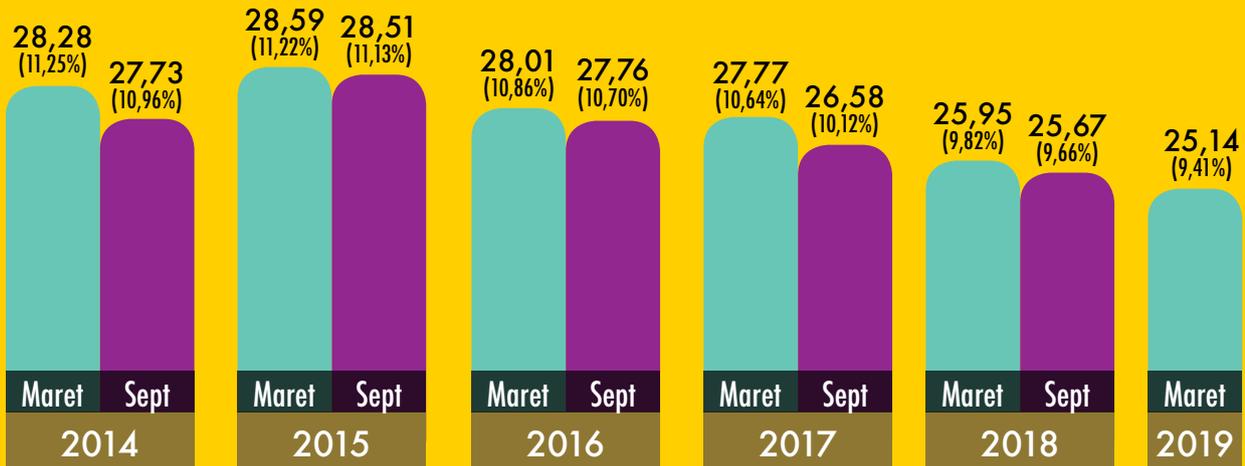
"Indonesia memastikan komitmen untuk mengimplementasikan *no one left behind* dengan lima langkah strategis, yaitu mengurangi ketimpangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengimplementasikan Pembangunan Rendah Karbon (PRK), mengintensifkan reformasi birokrasi, dan mendorong pendanaan alternatif dan inovatif untuk pencapaian TPB/SDGs."

Pemerintah Indonesia pada the Side Event HLPF "Leave no Child Behind: Achieving the SDGs through investing in the Rights of the Child" juga meluncurkan draf rancangan awal peta jalan Sustainable Development Goals Indonesia 2017-2030. Draft itu berisikan proyeksi beberapa indikator utama, *baseline*, dan intervensi kebijakan terkait SDGs yang akan diterapkan pemerintah hingga 2030. Peta Jalan SDGs Indonesia 2017-2030 dan Rencana Aksi Nasional SDGs 2017-2019 akan menjadi acuan penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

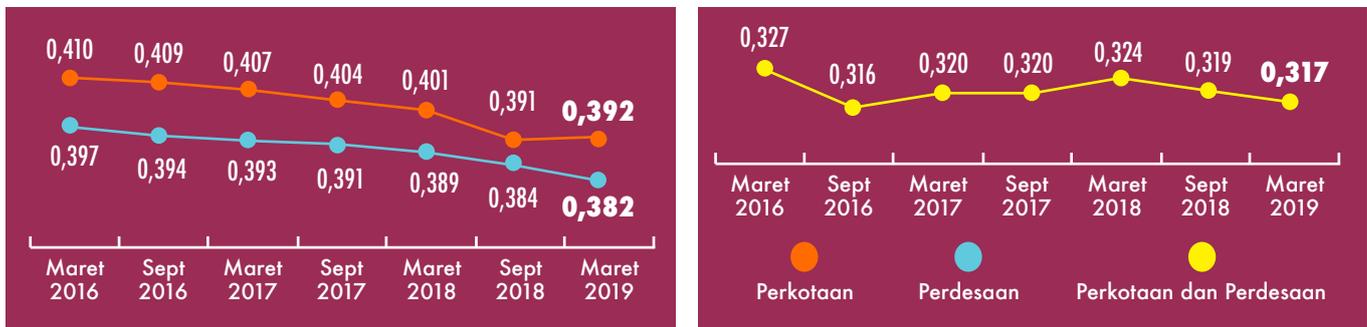
Dalam rangkaian acara lainnya di HLPF 2019, Bambang menyampaikan bahwa Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam pencapaian SDGs. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, angka kemiskinan berkurang menjadi satu digit, yaitu 9,66 persen pada September 2018. Kemudian, akses ke pendidikan di semua tingkatan meningkat dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berkurang.

# Perkembangan Sejumlah Indikator yang Berkaitan dengan Tujuan SDGs

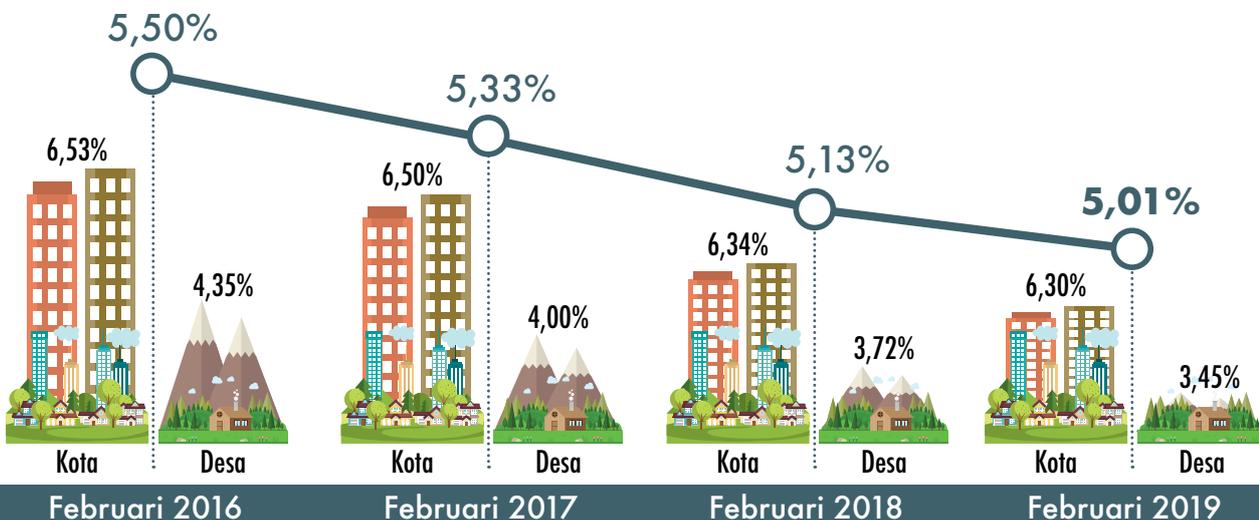
## 1. TINGKAT KEMISKINAN



## 2. RASIO GINI



## 3. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK

Dia menjelaskan, pencapaian tersebut didukung pembangunan ekonomi yang seimbang dengan pembangunan sosial dan lingkungan, tata kelola akuntabel, dan pelembagaan SDGs dari tingkat nasional hingga daerah dengan menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam RPJMN dan RPJMD.

“Saya menghargai upaya PBB dalam mendukung negara anggotanya untuk mencapai SDGs melalui berbagai badan dan program. Saya yakin kemitraan global yang lebih kuat merupakan kunci untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, saya menantikan penyelenggaraan SDGs Summit pada September tahun ini,” tutur Bambang saat melakukan pertemuan bilateral dengan President of the 73rd Session of the United Nations General Assembly María Fernanda Espinosa Garcés.

HLPF 2019 menjadi panggung bagi Indonesia untuk berbagi praktik terbaik dengan dunia, termasuk proses implementasi SDGs secara inklusif dengan melibatkan DPR RI, akademisi dan pakar, aktor nonpemerintah lain, serta Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan pemeriksaan SDGs. Di HLPF 2019, Indonesia juga membahas inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan inklusi sosial dan lingkungan hidup, pembiayaan inovatif untuk memobilisasi sumber daya seperti *green bonds*, *green sukuk*, dan pembiayaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf (Ziswaf), dan beberapa tantangan pembangunan, di antaranya memperkuat tata kelola, dan menghilangkan kemiskinan multidimensi, menghadapi bonus demografi, dan harus menangani kesenjangan pembiayaan pembangunan secara global.

### **Tantangan bagi Indonesia**

Pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit, dari 15,4 persen populasi yang hidup di bawah garis kemiski-

nan pada 2008, menjadi 9,66 persen pada September 2018. Indeks Jurang Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Indonesia juga menurun diikuti dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun dari 8,39 persen pada Agustus 2008 menjadi 5,34 persen pada Agustus 2018. “Hal ini menunjukkan bahwa saat ini lebih sedikit masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dibandingkan satu dekade yang lalu,” kata Bambang.



**Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi adalah instrumen yang paling kuat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.**

Menurut Bambang, inti dari masalah kemiskinan saat ini adalah kerentanan kronis yang sekaligus menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Banyak masyarakat miskin yang hidup dengan akses yang terbatas ke layanan dasar. Selain itu, banyak juga dari mereka merupakan lansia yang sekaligus menjadi kepala rumah tangga dengan standar hidup yang minimum, di antaranya seperti fasilitas perumahan yang buruk, resistensi rendah terhadap guncangan ekonomi, dan ketidakmampuan untuk mengakses layanan keuangan karena rendahnya literasi keuangan. Apabila kondisi-kondisi ini dibiarkan tanpa diberikan intervensi kebijakan yang tepat, maka dapat mengakibatkan mereka terjebak dalam siklus kemiskinan antar generasi.

“Kita tahu bahwa pertumbuhan

ekonomi adalah instrumen yang paling kuat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat juga dapat berdampak negatif bagi mereka yang tidak dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan tersebut. Karenanya, kita perlu mencari kebijakan dan intervensi baru,” ujar dia.

Pertumbuhan inklusif, jelas Bambang, berarti memastikan pertumbuhan yang tinggi, berkelanjutan, dan adil dengan memperluas akses ke pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat miskin. Kemudian, meningkatkan infrastruktur layanan dasar, memperdalam inklusi keuangan untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan, menciptakan lebih banyak peluang kerja, serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang berlandaskan tiga pilar utama, yaitu pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pilar perluasan akses dan kesempatan. Pemerintah Indonesia fokus untuk meningkatkan program perlindungan sosial, memperkuat layanan dasar, dan menciptakan mata pencaharian. Melalui strategi ini, Indonesia bertekad meningkatkan aset multidimensi masyarakat miskin, termasuk modal manusia, kohesi sosial, aset keuangan, dan infrastruktur dasar, agar mereka dapat hidup secara berkelanjutan di atas garis kemiskinan.

“Indonesia harus meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan mata pencaharian yang lebih baik terutama bagi kelompok ekonomi terendah, memperkuat kelompok berpenghasilan menengah, serta memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses pembangunan inklusif. Saya percaya, kemitraan adalah salah satu kunci untuk mewujudkan pembangunan inklusif,” pungkas Bambang. ●

# BPK Terapkan SAI PMF untuk Tingkatkan Kinerja



■ Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar

Manfaat yang diperoleh dengan penerapan SAI PMF adalah BPK memiliki dokumentasi area-area yang membutuhkan perbaikan dan menjadi dasar pengembangan serta perbaikan/reviu renstra tahun 2020-2024.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja organisasi. Komitmen itu diwujudkan dengan menerapkan penilaian mandiri (*self assessment*) menggunakan *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF) atau Kerangka Pengukuran Kinerja Lembaga Pemeriksa.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menjelaskan, SAI PMF digunakan sebagai mekanisme yang komprehensif untuk menilai kinerja SAI dan mengidentifikasi kesempatan untuk meningkatkan kinerja. Ada tiga tujuan penerapan SAI PMF. Pertama, men-

dapatkan gambaran kinerja SAI dan tingkat kesesuaian dengan *International Standard of Supreme Audit Institution* (ISSAI) yang ditetapkan oleh *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) serta praktik terbaik lainnya.

Tujuan kedua, menilai kekuatan dan kelemahan dalam rangka pengembangan kapasitas yang dibutuhkan. Adapun tujuan yang ketiga adalah membantu mengidentifikasi nilai dan manfaat SAI terhadap masyarakat, kata Bahrullah Akbar saat memberikan pengarahan dalam acara "*Kick Off Meeting IDI (INTOSAI Development Initiative) Facilitation Program SAI PMF*, di Jakarta, 18 Juni 2019.



■ Inspektur Utama, Ida Sundari

Komitmen BPK menggunakan SAI PMF sebagai alat ukur kinerja juga ditegaskan melalui surat pernyataan komitmen kepada IDI pada Januari 2019 tentang keikutsertaan pada SAI PMF Facilitation Program. Kegiatan itu dilaksanakan dalam bentuk *self assessment* dan didampingi oleh pihak IDI yang dilaksanakan pada Juni dan Juli. Selanjutnya akan dilaksanakan diskusi

dalam bentuk *workshop* pelaporan bersama IDI pada Oktober 2019.

Bahrullah menambahkan, *self assesment* dilakukan atas seluruh domain dan laporan *self assesment* ini akan disampaikan kepada IDI. Dia menegaskan perlu kerja sama semua pihak agar penilaian mandiri dapat berjalan lancar dan memberikan gambaran kondisi BPK dengan bukti yang

”

Dengan implementasi dan penilaian periodik SAI PMF, harapannya ke depan BPK bisa melakukan *peer review* untuk negara lain.

objektif dan terdokumentasi.

“Komitmen BPK terhadap SAI PMF juga ditunjukkan dengan memprakarsai SAI PMF Training dan menggunakan SAI PMF sebagai pendekatan dalam pelaksanaan *peer review* tahun 2019,” kata Bahrullah.

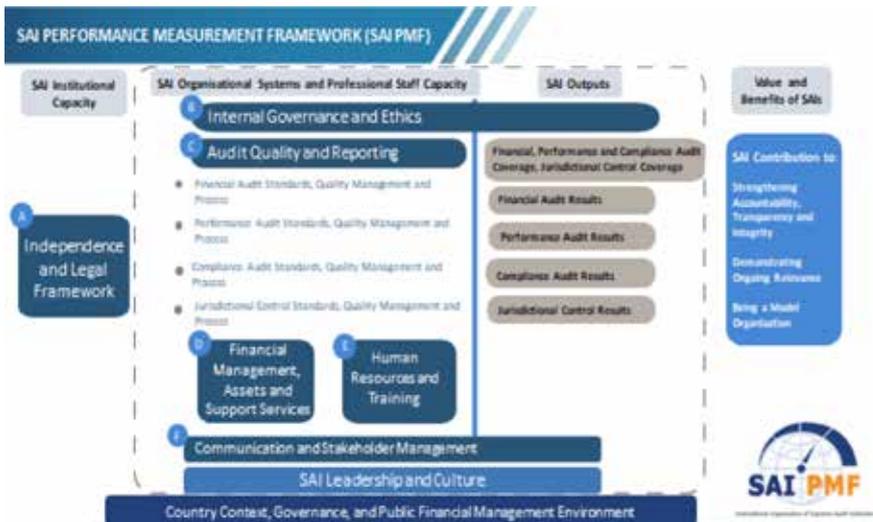
Bahrullah berharap keikutsertaan BPK dalam IDI Facilitation Program memberikan manfaat dan nilai tambah bagi BPK dalam meningkatkan kualitas organisasi dan Kualitas Rencana Strategis (Renstra) BPK.

“Sekali lagi, kualitas rencana strategis BPK sangat penting karena kita sedang menyiapkan Renstra 2020-2024. Maka persiapkan dengan baik sehingga kegiatan ini bisa menjadi alat penunjang bagi para anggota BPK untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.” Bahrullah berpesan.

Selanjutnya Bahrullah mengingatkan, keaktifan BPK di kancah internasional menuntut BPK untuk terus mengikuti segala perkembangan.

Secara lebih detail Inspektur Utama BPK Ida Sundari menjelaskan bahwa SAI PMF merupakan produk hasil kerja *Working Group on Value and Benefit of SAIs (WGVBS)-INTOSAI*. SAI PMF yang diluncurkan pada Kongres INTOSAI 2016 di Abu Dhabi tersebut dibuat guna menyeragamkan pola pengukuran kinerja BPK di seluruh dunia.

Sebenarnya BPK telah memiliki Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu



(SPKM) yang berisikan 9 pilar yang substansinya tak berbeda jauh dengan SAI PMF yang terdiri dari 6 domain. Jadi selama ini BPK telah melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan SPKM, namun pendekatan penilaiannya bersifat kualitatif, sedang dengan menggunakan SAI PMF pendekatan

### 1. Pilar SPKM

- a. Independensi dan mandat
- b. Kepemimpinan dan tata kelola internal
- c. Manajemen Sumber Daya Manusia
- d. Standar dan metodologi Pemeriksaan
- e. Dukungan Kelembagaan
- f. Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan
- g. Pengembangan Berkelanjutan
- h. Hasil
- i. Kinerja Pemerikaan

### 2. Pilar SAI PMF

- a. Independensi dan Kerangka Kerja Hukum
- b. Tata Kelola Internal dan Etik
- c. Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan
- d. Manajemen Keuangan, aset dan Jasa Pendukung
- e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
- f. Komunikasi dan Manajemen pemangku kepentingan

penilaiannya bersifat *scoring* atau pemberian bobot/nilai per kriteria.

Ditambahkan Ida, pengukuran kinerja melalui *peer review* dengan menggunakan SAI PMF baru dilaksanakan BPK pada tahun ini. Sebelumnya, BPK sudah empat kali menjalani *peer review* oleh SAI negara lain. Yang pertama pada 2004 oleh SAI Selandia Baru. Kemudian oleh SAI Belanda, dan SAI Polandia. Sedangkan pada tahun ini, *peer review* BPK dilakukan secara bersama oleh BPK Polandia, Norwegia, dan Estonia. "Jadi ada tiga negara yang bergabung untuk melakukan *peer review* di BPK Indonesia dengan menggunakan SAI PMF. Penggunaan SAI PMF untuk *peer review* merupakan arahan para pimpinan BPK.

Ia menjelaskan, para pimpinan BPK sudah mengarahkan agar SPKM yang berisikan 9 pilar diubah menjadi 6 pilar untuk mengadopsi SAI PMF. Perubahan itu saat ini sedang digodok.

Dia menjelaskan, akan ada perbedaan yang cukup signifikan dalam *peer review* jika menggunakan SAI PMF. Sebelum menggunakan SAI PMF, yaitu SPKM, BPK bisa memilih beberapa pilar yang ingin di-*review*. Jika hanya memilih 4 pilar, maka SAI yang melaksanakan *peer review* untuk BPK hanya melihat 4 pilar tersebut.

"Kalau menggunakan metodologi SAI PMF, untuk menilai kinerja secara keseluruhan maka seluruh domain harus direviu. Namun, karena kemarin

kan 4 pilar sudah dilakukan *peer review* lima tahun sebelumnya, berarti kurang 5 pilar. Nah, 5 pilar ini yang dilakukan *review* menggunakan indikator SAI PMF," ujar dia. Hasil penilaian dari masing-masing domain akan dianalisa untuk menentukan sebab utama dari permasalahan yang ditemukan (*root cause analysis*).

Ida memaparkan bahwa tolok ukur keberhasilan penerapan SAI PMF adalah adanya perkembangan dari area-area perbaikan yang diidentifikasi pada pelaksanaan penilaian awal atau periode sebelumnya. Dengan demikian, keberhasilannya hanya dapat terlihat melalui proses penilaian periodik secara rutin.

"Misalnya salah satu rekomendasinya supaya BPK membuat spesialisasi untuk para pemeriksa kinerja. Apakah BPK mau melaksanakan itu, karena di SAI lain itu sudah spesialisasi, seperti keuangan dan kinerja. Diharapkan BPK Indonesia sudah dilakukan spesialisasi untuk para pemeriksanya," jelas Ida.

Menekankan kembali bahwa manfaat yang diperoleh dengan penerapan SAI PMF adalah BPK memiliki dokumentasi area-area yang membutuhkan perbaikan dan menjadi dasar pengembangan serta perbaikan/reviu renstra tahun 2020-2024. Maka melalui penerapan SAI PMF, menurut Ida, akan mendorong BPK untuk meningkatkan desain dan implementasi Sistem Pengendalian Mutu, meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas serta independensi BPK sebagai lembaga dalam segala aspek termasuk anggaran.

Penerapan SAI PMF juga akan meningkatkan keselarasan proses bisnis BPK dengan praktik terbaik internasional yang diatur melalui *INTOSAI Framework of Professional Pronouncement (IFPP)* baik dalam tataran Prinsip Pendirian (*Founding Principles*), Prinsip Inti (*Core Principles*), Standar dan Pedoman (*Standard and Guidelines*).

"Dengan implementasi dan penilaian periodik SAI PMF, harapannya ke depan BPK bisa melakukan *peer review* untuk negara lain," ucap Ida. ●

# PEER REVIEW BPK DARI MASA KE MASA

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang menjalani *peer review* atau penelaahan sejawat. *Peer review* bertujuan menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar.

Sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota Organisasi Pemeriksa Keuangan Sedunia (INTOSAI). Pelaksanaan *peer review* itu merupakan amanat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang BPK.

BPK sebelumnya sudah tiga kali menjalani penelaahan sejawat oleh Supreme Audit Institutions (SAI) atau lembaga pemeriksa negara, yaitu oleh the Office of the Auditor General (OAG) New Zealand pada tahun 2004, Algemene Rekenkamer (ARK) Belanda atau Netherland Court of Audit di tahun 2009, dan Najwyzsza Izba Kontroli (NIK) Polandia di tahun 2014.

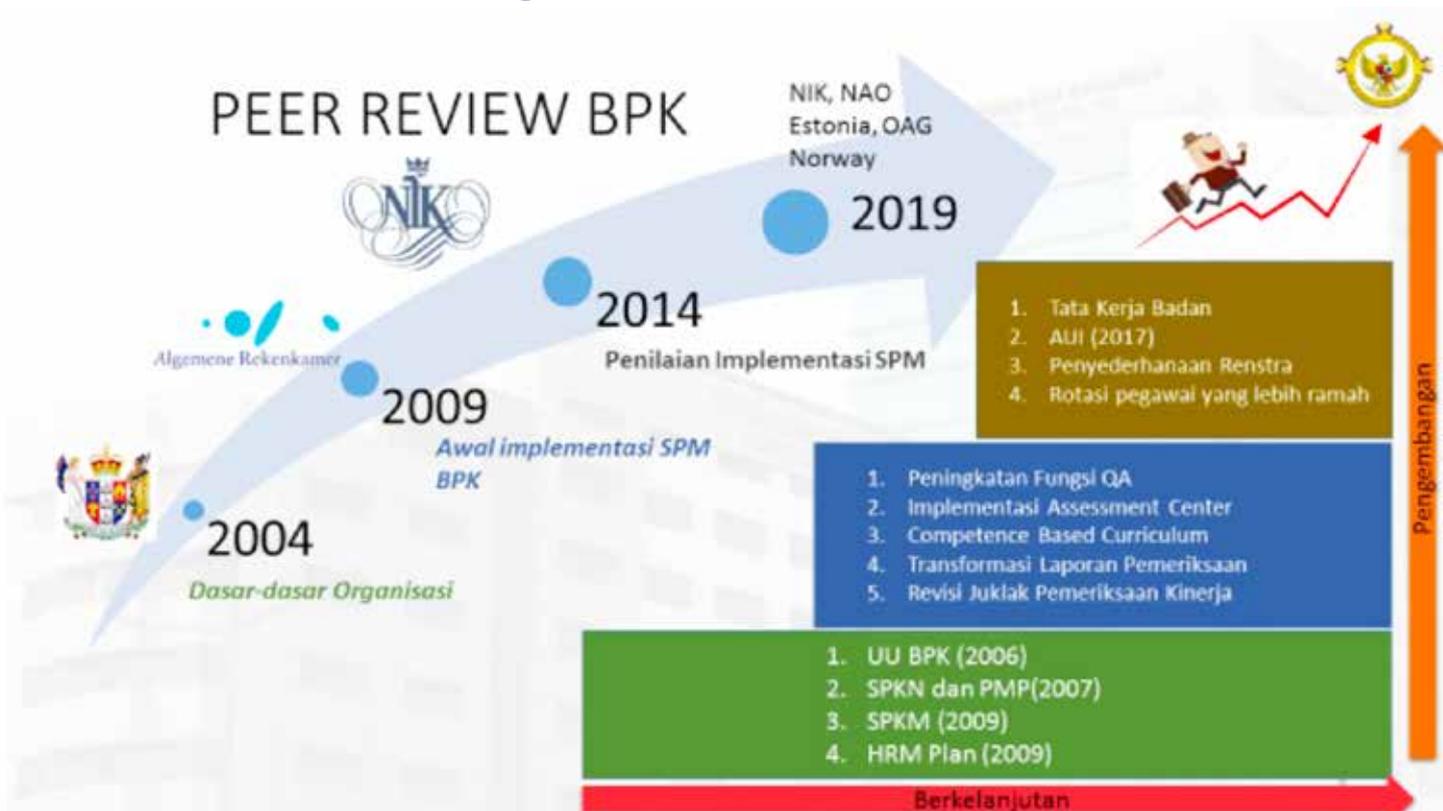
**Sumber:** Inspektorat Utama BPK RI

## 1. Peer Review BPK 2004

**P**eer Review BPK 2004 ini merupakan *peer review* pertama di BPK yang dilakukan oleh OAG New Zealand. *Peer review* ini memberikan masukan perbaikan dan menjadi salah satu dasar pengembangan organisasi BPK: penguatan mandat BPK dengan terbitnya UU No. 15 tahun 2006, Penyusunan Renstra BPK 2006-2010, Penyusunan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara serta Pedoman Manajemen Pemeriksaan untuk memperkuat metodologi pemeriksaan BPK agar kualitas pemeriksaan BPK lebih baik. Untuk mendukung pemeriksaan, OAG New Zealand juga merekomendasikan agar BPK menyusun mekanisme pemastian kualitas pemeriksaan.

Hal ini ditindaklanjuti BPK dengan diterbitkannya Standar Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) BPK. Dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia, BPK menindaklanjuti rekomendasi *Peer Review* 2004 dengan menyusun *Human Resources Management Plan* yang merupakan rencana komprehensif pengelolaan SDM BPK sejak perencanaan sampai dengan pemberhentian pegawai BPK, termasuk pendidikan dan pengembangan kompetensinya.

Pengembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat di BPK, terutama penggunaan TI dalam pemeriksaan dalam hal ini untuk pengelolaan KKP dan manajemen pemeriksaan. Kita dapat simpulkan bahwa hasil *peer review* 2004 memberikan panduan kepada BPK agar membangun pondasi organisasi yang kuat.





## 2. Peer Review BPK 2009

**P**eer Review BPK 2009 dilakukan oleh ARK Belanda. *Peer review* ini dilakukan pada awal implementasi SPM BPK. *Review* dilakukan atas sembilan pilar SPM BPK dan dijadikan *base line* implementasi SPM BPK. Hasil *peer review* 2009 antara lain ditindaklanjuti dengan peningkatan fungsi Itama diantaranya dengan spesialisasi 3 (tiga) Inspektorat Utama, implementasi *assessment center*, perubahan juklak dan juknis pemeriksaan.

## 3. Peer Review BPK 2014

**P**eer Review BPK 2014 dilaksanakan oleh NIK Polandia dengan fokus revidu atas 4 (empat) elemen Sistem Pengendalian Mutu BPK : Independensi & Mandat, Kepemimpinan & Tata Kelola, Standar dan Metodologi Pemeriksaan, dan Kinerja Pemeriksaan.

Beberapa rekomendasi dipandang strategis untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan fungsi BPK sesuai dengan mandat UU, terkait dengan:

- a. Posisi Pimpinan BPK dan penunjukan Badan
- b. Kedudukan BPK dalam pemeriksaan terkait kerugian negara
- c. Hubungan dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
- d. Kemudahan akses atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK oleh publik.
- e. Peningkatan citra BPK di mata para pemangku kepentingan
- f. Pengembangan sistem Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung pemeriksaan
- g. Peningkatan ketiga jenis pemeriksaan dari segi metodologi pemeriksaan, penentuan materialitas, analisa risiko, penentuan topik dan cakupan pemeriksaan, pelaksanaan, dan penulisan laporan.

## 3. Peer Review BPK 2019

**B**erbeda dengan *peer review* sebelumnya, pada tahun 2019, *peer review* dilakukan dengan metode *joint review*, direviu oleh 3 SAI negara lain yakni dengan Team Leader dari NIK Polandia sedangkan anggota tim masing-masing dari The Office of the Auditor General of Norway (OAG) Norwegia dan National Audit Office of Estonia (NAOE) Estonia. Pengalaman para penelaah dari negara yang berbeda dan manfaat yang lebih besar bagi pengembangan kinerja BPK merupakan latar belakang pemilihan Tim Penelaahan tersebut. *Peer Review* atas SPM BPK dengan menggunakan kriteria SAI Performance Measurement Framework (SAI PMF) dengan fokus pada:

- a. Domain A: *Independence & Legal Framework*
- b. Domain B: *Internal Governance & ethic* (khusus Perencanaan Pemeriksaan)
- c. Domain C: *Audit Quality and Reporting*
- d. Domain D: *Financial Management, Asset & Support System* (khusus TI)
- e. Domain E: *Human Resources & Training*

Sampai dengan saat ini, kegiatan *Peer Review* BPK 2019 sedang dalam proses penyusunan laporan final.

### Tahapan-tahapan Peer Review BPK 2019

*Preliminary Review* telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari sampai dengan 2 Februari 2019 di Kantor Pusat BPK RI.

- a. *Field Work Peer Review* Tahap I telah dilaksanakan pada 25 sampai dengan 29 Maret 2019 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- b. *Field Work Peer Review* Tahap II telah dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali pada tanggal 18 s.d. 20 Mei 2019 dan di Kantor Pusat BPK RI pada tanggal 21-24 Mei 2019.
- c. *Reporting* atau tahap Pelaporan telah dilaksanakan pada 17- 20 Juni 2019 di Warsawa, Polandia.
- d. Penyampaian Laporan, rencananya akan dilaksanakan pada pekan ketiga Agustus 2019 di Kantor Pusat BPK RI di Jakarta.

### Manfaat yang diperoleh BPK dari *peer review*.

1. Membantu BPK untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam upaya memastikan BPK telah mematuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta telah mengatur tata kelola pekerjaan pemeriksaannya.
2. Membantu mengidentifikasi area dan fungsi untuk meningkatkan kapasitas BPK, membantu menyusun keputusan untuk meningkatkan operasi/kegiatan dan kinerja agar selaras dengan praktik internasional yang baik serta memberikan opini yang independen atas desain dan operasi dari kerangka kerja manajemen BPK.

# Sejarah SIMDA dan Pemanfaatannya oleh BPK

Salah satu tantangan penggunaan aplikasi sistem keuangan daerah dalam proses pemeriksaan adalah tidak seragamnya aplikasi yang digunakan.

**P**ara pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu dibekali pengetahuan dan kemampuan teknologi informasi (TI) untuk menunjang proses pemeriksaan. Hal ini mengingat ada begitu banyaknya aplikasi atau program komputer yang digunakan pemerintah daerah (pemda) dalam pencatatan keuangan.

Salah satu program komputer yang dipakai pemda adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA dibuat untuk menyediakan basis data mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.

SIMDA diinisiasi oleh anggota BPK periode 2004-2009, Drs Imran pada 2003 saat ia menjabat sebagai Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mendapatkan hak cipta SIMDA dari Kementerian Hukum dan HAM (dahulu Depkumham) pada 18 Maret 2004.

Kepada *Warta Pemeriksa*, Imran menceritakan latar belakang dirinya menginisiasi SIMDA. Pria kelahiran



■ Drs Imran

Teluk Bayur, Padang itu mengisiasi SIMDA untuk membantu pemerintah daerah dalam menyambut otonomi daerah. Kala itu, kata dia, sudah keluar berbagai peraturan, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun

2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

“Banyak permintaan dari pemerintah daerah. Itu karena PP tersebut mengharuskan pemda mempertanggungjawabkan keuangannya. Harus



■ Kepala Biro TI BPK, Jariyatna



Terkait dengan aplikasi SIMDA, BPK secara kelembagaan dahulu berkomitmen dengan BPKP untuk melakukan standardisasi sehingga pemeriksa bisa memakai datanya.

ada neracanya, harus ada arus kasnya. Itu *kan* memerlukan profesi di bidang akuntansi. Sedangkan otonomi daerah baru diterapkan saat itu,” ujar Imran.

Saat ditunjuk menjadi Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, ia ditugaskan membuat kajian-kajian. Ia kemudian mempelajari Undang-Undang Otonomi Daerah. Setelah mempelajari secara keseluruhan, ia menilai daerah akan kesulitan menjalani amanah undang-undang tersebut dalam hal pertanggungjawaban keuangan.

“Saya rasa berat ini bagi daerah. Kita tahu pegawai pemda itu keahliannya dilatih untuk pamong. Akhirnya laporan-laporan yang mereka buat tidak begitu baik. Saya mulai sadar. Saya ajak staf saya, akuntan-akuntan dan pejabat fungsional pada 2002 untuk mulai membuat suatu terobosan,” kata Imran.

Singkat cerita, proses penyusunan program komputer SIMDA rampung pada 2003. Setahun kemudian, tepatnya Maret 2004, ia pensiun dari BPKP. Kemudian pada Oktober 2004 menjadi Anggota BPK.

Kepala Biro Teknologi Informasi Jariyatna mengatakan bahwa dalam pemeriksaan antara lain terdapat proses pengambilan dan pengolahan data. Salah satu data yang dapat di ambil adalah data transaksi keuangan pemerintah daerah.

“Ada banyak aplikasi yang digunakan pemda. Ada SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan) yang awalnya dibuat oleh Kota Pekalongan

dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Lalu, ada BPKP SIMDA. Kementerian Dalam Negeri ada SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah), dan beberapa menggunakan aplikasi buatan sendiri,” ujar dia.

Di tengah banyaknya aplikasi tersebut, Biro TI BPK berperan membantu meningkatkan kompetensi pemeriksa. Pemeriksa diberikan pelatihan mengolah data dari aplikasi yang ada. Mulai dari cara pengambilan data sampai dengan pengolahannya.

“Teman-teman pemeriksa dalam mengolah data bisa memakai Microsoft Excel, bisa juga SQL, ACL, dan memakai Microsoft access. Beberapa aplikasi familiar dengan program tersebut. Terkait dengan aplikasi SIMDA, BPK secara kelembagaan dahulu berkomitmen dengan BPKP untuk melakukan standardisasi sehingga pemeriksa bisa memakai datanya.”

Dia mengungkapkan, salah satu tantangan dalam hal penggunaan aplikasi sistem keuangan daerah dalam proses pemeriksaan adalah tidak seragamnya aplikasi yang digunakan. SIMDA pun tak dipakai oleh semua pemda. “Kalau informasi yang kita terima, itu mungkin hanya setengah pemda yang memakai SIMDA. saya tidak tahu tepatnya, karena memang tidak ada rilis secara resmi terkait itu. Ada yang mengatakan sekian ratus pemda. Data itu naik dan turun sesuai yang ada di lapangan karena banyaknya pilihan aplikasi,” kata dia.

Terkait SIMDA, versi yang digunakan pemda juga berbeda. Berbeda versi, maka berbeda struktur data yang diambil. “Kalau ingin menstandarkan dua versi yang berbeda, itu pekerjaan baru lagi. Itu yang menjadi tantangannya. Lalu, berikutnya sering kali penggunaan IT di daerah tidak selalu dominan, terkadang koreksi manual masih dilakukan. Itu menjadi pekerjaan tersendiri, karena data itu belum final,” ia menjelaskan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Jariyatna berencana mengundang teman-teman pemeriksa di perwakilan. Ada beberapa hal yang akan disinergikan. Poin utamanya adalah melakukan pemetaan untuk menginventarisasi aplikasi versinya mana saja yang ada digunakan pemda. “Karena memang bukan hanya SIMDA yang menjadi fokus kita. Yang menggunakan aplikasi Kemendagri juga ratusan pemda jumlahnya.” ●



■ Ketua BPK RI dan Royal Prince of Kuwait bersama pimpinan SAI anggota ASOSAI Governing Board.

# Ketua BPK Menghadiri Pertemuan ASOSAI Governing Board Ke-54 di Kuwait City

Ketua BPK menyampaikan bahwa dalam periode kepemimpinan 2017–2019, INTOSAI WGEA telah menghasilkan berbagai produk yaitu *audit guidance*, *research paper* dan *training tools*.

**K**etua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menghadiri pertemuan ASOSAI Governing Board ke-54 yang diselenggarakan pada tanggal 23–24 Juli 2019 di Kuwait City, Kuwait. Pertemuan yang dihadiri oleh 82 peserta dari 12 SAI anggota ASOSAI Governing Board ini bertujuan untuk membahas isu-isu strategis di ASOSAI yang mencakup laporan implementasi Renstra ASOSAI, pembahasan laporan keuangan, pelaksanaan kegiatan *Capacity Development*, *research project* dan kerjasama dengan organisasi regional lainnya. Agenda penting lainnya dalam pertemuan ini adalah pemilihan wakil ASOSAI yang akan menjadi anggota INTOSAI Governing Board periode 2019–2025.

Dalam pertemuan ini, Ketua BPK

sebagai Ketua INTOSAI Working Group on Environmental Auditing melaporkan progres kegiatan INTOSAI WGEA. Dalam laporannya, Ketua BPK menyampaikan bahwa dalam periode kepemimpinan 2017–2019, INTOSAI WGEA telah menghasilkan berbagai produk yaitu *audit guidance*, *research paper* dan *training tools*. Lebih lanjut, Ketua BPK juga menyampaikan bahwa masa kepemimpinan BPK di INTOSAI WGEA akan berakhir tahun ini. Kepemimpinan WGEA akan diserahkan ke SAI Finlandia di INCOSAI XXIII yang akan diselenggarakan di Moskow, Rusia pada 23–28 September 2019.

Selain itu, Ketua BPK juga melakukan *bilateral discussion* dengan Auditor General Malaysia yang baru, Dato' Nik Azman Nik Abdul Majid untuk perkenalan dan membahas isu *legal capacity* di ASEANSAI. Dari pertemu-

muan ASOSAI GB ke 54 ini, disepakati bahwa SAI Jepang dan SAI Thailand akan mewakili ASOSAI sebagai anggota INTOSAI Governing Board periode 2019–2025.

Dalam kunjungan ke Kuwait ini, diselenggarakan juga acara sosialisasi dan tatap muka antara Ketua BPK dengan Warga Negara Indonesia di Kuwait mengenai Korupsi dan Pengawasan Keuangan Negara di Aula KBRI Kuwait pada 21 Juli 2019. Berbagai organisasi dan asosiasi masyarakat Indonesia yang hadir dalam acara tersebut antusias mengikuti acara tersebut.

Turut hadir mendampingi Ketua dalam pertemuan ASOSAI Governing Board ke 54 ini Sekretaris Jenderal, Bahtiar Arif, Kepala Bagian Sekretariat Ketua, Firdaus Amyar dan Kepala Subbagian INTOSAI, ASOSAI dan ASEAN-SAI. ●

# Belajar Pengendalian 1,7 Triliun Dolar AS di New York



■ Kunjungan kerja Anggota II BPK dan delegasi BI ke Federal Reserve Bank of New York.

Sebagian besar mata uang tersebut berada di luar negeri.

**A**nggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono melakukan supervisi atas pemeriksaan interim kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) di New York. Pada kesempatan tersebut, Anggota II BPK bersama delegasi BI melakukan kunjungan kerja ke Federal Reserve Bank of New York pada 18 Juli 2019.

Rombongan mendapat kesempatan untuk melakukan *walk-through* di The East Rutherford Operations Center (EROC), New Jersey. EROC adalah kantor perwakilan bank sentral Amerika Serikat (AS) yang menangani proses dan distribusi kas. Dalam hal ini, yaitu mata uang dolar AS, baik secara nasional maupun global.

Setelah melihat fasilitas pemrosesan kas, rombongan mendapat kesempatan berdiskusi tentang distribusi uang dengan beberapa pejabat senior di Federal Reserve Bank of New York. Mereka antara

lain, vice president Eileen M Goodman dan global currency services officer Elliot Shuke.

Diskusi yang berlangsung di gedung EROC antara lain berbicara mengenai upaya Federal Reserve Bank mengendalikan sekitar 1,7 triliun dolar AS yang beredar saat ini. Menariknya, sebagian besar mata uang tersebut berada di luar negeri.

Pembicaraan lainnya adalah mengenai fluktuasi permintaan uang yang sebagian besar tergantung pada faktor geopolitik dan kebijakan *governing board* untuk menjamin tersedianya sistem pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perdagangan. Kemudian rencana alternatif (*contingency plan*) yang disusun oleh Federal Reserve Bank, prosedur permintaan pencetakan uang, rencana pengembangan infrastruktur, dan upaya mengatasi peredaran uang palsu.

Selain itu dijelaskan pula secara singkat mengenai pihak yang melakukan audit atas Federal Reserve Bank dan jenis audit yang dilakukan. Dari kunjungan kerja ini, BI dan BPK berharap dapat mengambil pelajaran yang dapat digunakan untuk perbaikan instansi masing-masing. ●



■ Ketua, Anggota I, Anggota V BPK bersama Pimpinan SAO Thailand.

# Kunjungi BPK, SAO Thailand Jajaki Kerja Sama

Agenda utama kunjungan ini adalah *scooping mission* dan menjajaki kemungkinan kerja sama bilateral antara BPK dan SAO Thailand.

**K**etua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moer mahadi Soerja Djanegara menerima kunjungan delegasi dari State Audit Office of the Kingdom of Thailand (SAO Thailand) di kantor pusat BPK di Jakarta, Kamis 11 Juli 2019.

Rombongan SAO Thailand dipimpin oleh Auditor General SAO Thailand Prajuck Boonyoung yang didampingi oleh deputy auditor general Sirin Phankasem, head of international academic division Sutthi Suntharanurak, dan head of international development division Pitikhun Nilthanom. Sementara Ketua BPK didampingi Ang-

gota I Agung Firman Sampurna dan Anggota V Isma Yaton.

Agenda utama kunjungan ini adalah *scooping mission* dan menjajaki kemungkinan kerja sama bilateral antara BPK dan SAO Thailand. Selanjutnya, dilakukan *executive discussion* yang dimoderatori oleh sekretaris jenderal

Bahtiar Arif.

Dalam pertemuan itu, dibahas mengenai tujuan pelaksanaan kerja sama BPK dan SAO Thailand. Kemudian kesuksesan kerja sama trilateral Laos-Thailand-Jerman, serta serta kemungkinan *renewal MoU* dengan *action plan* tahun 2019-2022. Rencana kerja itu meliputi tiga topik, yaitu *visiting fellowship program*, *bilateral seminar: sharing experience in external auditor of UN bodie*, dan *cooperative research on auditing SDGs goal no 16*.

Ketua BPK menyampaikan bahwa sebagai sesama lembaga audit negara, kerja sama dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. "Karena bersama-sama, kita dapat menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada jika kita bertindak secara individu. Sebagaimana moto INTOSAI, 'Experientia Mutua Omnibus Prodest'. Yang artinya, pengalaman bersama memberikan manfaat bagi semua," ujar Ketua BPK. ●



■ Ketua BPK RI bersama Auditor General SAO Thailand.

# BPK Bahas Draf Hasil *Peer Review* di Polandia

*Peer review* telah dilakukan secara *joint team* oleh tiga SAI, yaitu NIK Poland, Riksrevisjonen Norway, dan Riigikontroll Estonia.

**W**akil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar melakukan kunjungan ke SAI Polandia (Najwyszszalza Kontroli-NIK). Kunjungan bilateral untuk memperkuat kerja sama itu dilakukan ke kantor pusat NIK di Warsawa dan kantor perwakilan NIK di Krakow Polandia pada 8–9 Juli 2019.

Mengawali pertemuan, Wakil Ketua BPK melakukan *courtesy call* kepada Presiden NIK Krzysztof Kwiatkowski. Setelah itu, dia melakukan *office tour* yang dipandu langsung oleh Kwiatkowski yang menjelaskan mengenai sejarah NIK dan struktur organisasinya.

Acara dilanjutkan dengan pembahasan draf hasil *peer review* terhadap BPK pada 2019 dengan ketua tim Piotr Prokopczyk. *Peer review* ini telah dilakukan secara *joint team* oleh tiga SAI, yaitu NIK Poland, Riksrevisjonen Norway, dan Riigikontroll Estonia.

*Peer review* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017. *Beleid* itu menyatakan bahwa *peer review* dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Dengan begitu dapat menjamin bahwa mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPK telah sesuai standar.

Laporan hasil *peer review* akan diserahkan ke BPK pada pekan ketiga Agustus 2019. Pertemuan selanjutnya adalah seminar bilateral yang memba-



■ Kunjungan Wakil Ketua dan delegasi BPK ke SAI Polandia.

has topik *legal service for audit matters* dan *internal control standards*.

Delegasi BPK mendapat masukan antara lain mengenai sistem kolegial pengambilan keputusan perencanaan dan akses informasi pemeriksa. Kemudian mekanisme penjaminan mutu berjenjang NIK sebelum laporan pemeriksaan final ditandatangani oleh ketua. Termasuk publikasi rencana kerja dan hasil pemeriksaan.

Kegiatan hari berikutnya adalah kunjungan ke kantor perwakilan (*NIK regional branch*) wilayah Krakow. Bahrullah Akbar diterima langsung oleh head of regional branch of Krakow. Pada pertemuan ini, delegasi BPK mendapat penjelasan mengenai pengalaman *regional branch* Krakow dalam audit manajemen polusi udara. Termasuk menjadi koordinator *joint*

*audit* untuk topik yang sama dalam wadah EUROSAI WGEA.

Delegasi juga melakukan kunjungan ke KBRI Warsawa dan diterima langsung oleh Dubes Siti Nugraha Mauludiah. Pertemuan bertujuan menyamakan persepsi dan komitmen sinergi dalam rangka mendukung peran BPK mempromosikan tata kelola yang baik. Kemudian transparansi dan akuntabilitas keuangan sektor publik di lingkup nasional, regional, maupun internasional.

Dalam kunjungan ini, Wakil Ketua BPK didampingi oleh inspektur pemeriksaan internal dan mutu kelembagaan Maulana Ginting, kepala bagian kerja sama internasional Wahyudi, kepala subdirektorat pengembangan hukum Sarmauli Marpaung, dan kepala bidang pemeriksaan internal dan mutu kelembagaan, Sainem. ●

# I NYOMAN WARANA, AUDITOR UTAMA INVESTIGASI BPK

## Adaptasi Jadi Kunci

**B**ekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus pintar beradaptasi dan berani menerima tantangan baru. Hal itu yang selalu ditekankan I Nyoman Wara selama menjalani karier di BPK. I Nyoman yang pada awal-awal kariernya banyak melakukan pemeriksaan untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

tiba-tiba mendapat tantangan untuk memeriksa Bank Indonesia. Uniknya, tantangan itu didapatnya saat berada di angkutan umum.

Kepada *Warta Pemeriksa*, I Nyoman menceritakan kisahnya sejak memulai karier di BPK hingga saat ini dipercaya menjadi Auditor Utama Investigasi. Berikut petikan wawancaranya.



■ Auditor Utama Investigasi BPK, I Nyoman Wara

### Bagaimana perjalanan karier bapak di BPK sampai sekarang menjabat sebagai Auditor Utama Investigasi?

Waktu kecil, saya tidak pernah terbayangkan akan bekerja di BPK. Namun, ketika saya mendapat beasiswa kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), pada waktu Tingkat II Tahun 1988 diminta untuk memilih instansi. Pada waktu itu, pilihan pertama saya adalah BPK. Saya menjadi CPNS di BPK tahun 1988. Saat lulus STAN tahun 1989, saya ditempatkan di Sub Auditorat I-3, membidangi BUMN perindustrian. Kemudian ada reorganisasi BPK sekitar tahun 1995/1996. Saya dipindah ke Sub Auditorat VB2 yang membidangi BUMN Perhubungan sampai dengan tahun 1999.

Tahun 1999, keluar UU BI yang baru, di mana menurut UU BI laporan keuangan BI diaudit oleh BPK. Di situ BPK akan melakukan audit atas neraca awal BI setelah dibentuk dengan UU yang baru. Pada waktu itu, saya bertemu dengan almarhum Pak Hasan Bisri (mantan Wakil Ketua BPK) di angkutan umum, dan beliau menanyakan apakah saya mau membantu beliau memeriksa BI.

Lalu saya menjawab, bahwa saya bersedia membantu beliau memeriksa BI. Padahal waktu itu saya tidak terpikir bagaimana memeriksa BI sebagai entitas besar dan paling canggih di Indonesia. Kemudian beliau meminta saya menjadi salah satu Ketua Sub Tim. Sejak saat itu saya mulai dikenal sebagai auditor BI, meskipun secara formal saya masih ditempatkan di Sub Auditorat VB2.



Pada tahun 2002, saya diangkat menjadi Kepala Seksi di BI dan merangkap Plt. Kepala Sub Auditorat II.B1 yang membidangi BI. Tidak lama kemudian saya diangkat menjadi Kepala Sub Auditorat BI, sehingga praktis di Eselon IV sampai Eselon III saya membidangi BI. Tahun 2008 sampai dengan 2010, saya menjadi Kepala Auditorat II B yang membidangi LKPP, Kementerian Perekonomian, dan Kementerian Keuangan.

Tahun 2010 saya dipindah ke Kepala Perwakilan Banten sampai dengan tahun 2013. Namun di awal-awal saya tetap aktif membantu pemeriksaan di pusat, misalnya pemeriksaan Bank Century, pemeriksaan BI dan LKPP. Kemudian tahun 2013 saya dipromosikan menjadi Staf Ahli Bidang Investigasi selama 3 tahun, lalu tahun 2016 dengan dibentuknya Auditorat Utama Investigasi (AUI) saya dipercaya menjadi Auditor Utama Investigasi. Itu jadi cerita singkat mengenai perjalanan saya.

#### **Apa alasan bapak memilih BPK saat pertama kali ditawarkan memilih instansi pemerintah?**

Waktu itu yang terbayang oleh saya, kalau di BPK adalah saya ingin keliling Indonesia. Selain itu, saya juga kagum dengan Ketua BPK saat itu, Jenderal TNI (Purn) M Jusuf sebagai sosok yang dikenal berwibawa, tegas dan disegani. Jadilah saya memilih BPK.

#### **Pengalaman apa yang paling berkesan selama berkarier di BPK?**

Kalau saya prinsipnya adalah setiap pengalaman, setiap peristiwa, setiap orang yang saya temui itu sangat unik dan memberikan kesan mendalam, di manapun itu. Saya bahkan masih ingat bagaimana untuk pertama kali saya mendapat tugas pemeriksaan. Jadi saya merasa tidak ada suatu pengalaman yang lebih istimewa daripada yang lain. Menurut saya semua spesifik, unik, dan memberikan kesan mendalam terhadap saya dan sangat membantu perjalanan karier saya ke depannya.

#### **Mungkin ada yang lebih spesifik yaitu pengalaman unik seperti pemerik-**

#### **saan di Banten atau di tempat lain?**

Kalau masing-masing uniknya bisa saya jelaskan. Waktu itu saya pertama kali ditempatkan di Sub Auditorat I-3, saya banyak belajar dari senior-senior yang sangat handal dalam pemeriksaan. Kemudian saya pindah ke BUMN Perhubungan. Itu unik juga bagi saya, misalnya kami mulai belajar menerapkan Electronic Data Processing (EDP) audit. Kemudian setelah memeriksa BI, pengalaman saya juga unik. Saya banyak belajar bagaimana cara bekerja dengan standar internasional karena bekerja sama dengan KPMG. Saat itu untuk pertama kali kita belajar menerapkan *risk base audit* dan memeriksa transaksi internasional terkait cadangan devisa.

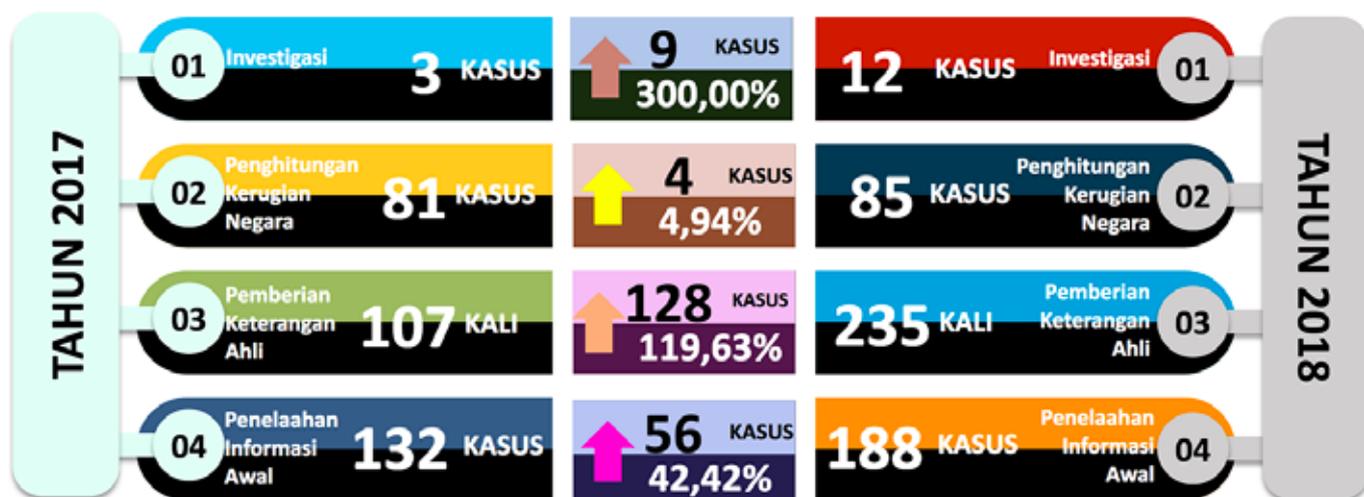
Ketika saya pindah memeriksa LKPP, saya belajar bagaimana mengorganisir tim besar karena mencakup seluruh kementerian dan lembaga. Waktu itu kami membuat panduan pemeriksaan yang dikenal dengan nama "buku merah". Buku itu menjadi panduan bagi pemeriksaan LKPP dan LKKL.

Berbeda dengan BI dan Kementerian Keuangan yang sudah sangat paham dengan standar akuntansi dan audit, di Banten kami berhadapan entitas dan masyarakat yang baru belajar mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan. Sehingga kami harus dapat mengkomunikasikan pemeriksaan BPK dengan bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat awam. Waktu itu pimpinan BPK berpesan agar saya menemui Gubernur Banten dan mengatakan bahwa saya diminta oleh pimpinan BPK untuk membantu pemerintah Provinsi Banten memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Selesai dari Banten tahun 2013, saya menjadi Staf Ahli Bidang Investigasi, tapi staf ahli juga sangat unik, karena sebagai staf ahli saya diminta untuk membantu pimpinan dalam mengkoordinasikan pemeriksaan investigatif di BPK.

#### **Auditorat Utama Investigasi ini terbilang baru yang dibentuk pada tahun 2016, itu tantangannya seperti apa? Lalu hal apa yang dirasa sangat berbeda dari jabatan sebelumnya?**

Ke depan, kita ingin AUI menjadi pusat forensik keuangan negara. Jadi, apabila bicara soal penyimpanan keuangan negara, seharusnya bicara kepada BPK.

## OUTPUT AUI 2017-2018



Paling tidak saya melihatnya ada 2 tantangan utama. Pertama mengenai pengembangan SDM, kedua membangun budaya kerja. SDM jelas secara kuantitas kita kurang, karena saat ini baru 50 persen dari kebutuhan. Untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi dan penghitungan kerugian negara (PKN) yang jumlahnya semakin banyak, kita harus pinjam dari unit kerja lain.

Kita memerlukan pemeriksa-pemeriksa yang mempunyai kualifikasi yang mampu dan mau melakukan pemeriksaan investigatif. Selain itu, pimpinan BPK selalu menekankan bahwa AUI harus menjadi "role model" bagi unit kerja lain di BPK, baik di bidang profesionalisme maupun integritas. Hal ini tidaklah mudah.

Kepercayaan pihak luar seperti KPK, polisi, jaksa itu sangat tinggi. Untuk memenuhi ekspektasi para *stake holders* harus dibarengi dengan kinerja yang prima dari AUI untuk menjaga kredibilitas BPK.

Ke depan, kita ingin AUI menjadi pusat forensik keuangan negara. Itu harapan saya. Jadi seharusnya bila bicara soal penyimpangan keuangan negara, itu harusnya bicara ke BPK, tidak ada lembaga lain yang bisa bicara, harus BPK. Acuan apa pun harus BPK, karena kewenangan itu ada di BPK.

Kalau kewenangan itu tidak dipenuhi secara baik oleh BPK, untuk apa diberi kewenangan sementara kita tidak mampu menjalani kewenangan itu. Itu harapan kita ke depan.

Hasil pekerjaan AUI baik berupa LHP maupun keterangan ahli harus berkaitan dengan

permasalahan hukum. Oleh karena itu, hasil pekerjaan AUI harus bisa dipertahankan di pengadilan. Pekerjaan AUI juga rawan dituntut oleh pihak lain. Jangankan pemeriksa, saya selaku Tortama juga tidak terlepas dari risiko tuntutan. Oleh karena itu insan di BPK harus betul-betul siap.

### Apa yang sedang menjadi fokus bapak sebagai Auditor Utama Investigasi?

Di samping mengembangkan SDM dan budaya kerja, AUI juga fokus untuk menyelesaikan permintaan pemeriksaan investigasi, PKN dan keterangan ahli dari aparat penegak hukum yang jumlahnya semakin meningkat. Dalam memenuhi permintaan mereka, tentu AUI tetap harus bekerja dalam koridor ketentuan yang berlaku, standar dan keyakinan mutu sebagaimana diatur di SPKM BPK.

Pada saatnya, saya bercita-cita BPK khususnya AUI dapat menjadi semacam "Pusat Forensik Keuangan Negara". BPK harus menjadi acuan dalam penanganan *fraud* di bidang keuangan negara.

### Pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemeriksa muda BPK?

Tetaplah bersikap menjadi orang yang biasa-biasa saja. Jangan berambisi untuk menjadi orang yang luar biasa. Dengan sikap menjadi orang yang biasa-biasa saja itu, bekerjalah dengan sebaik-baiknya dan alam semesta yang akan mengatur hasilnya untuk kita. Kewajiban kita hanya bekerja dengan sebaik-baiknya. ●

**SLAMET SOEDARSONO**

DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN  
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

# Mustahil tanpa Akuntabilitas dan Transparansi



■ Slamet Soedarsono

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut bertanggung jawab untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs). Karenanya, sebagai lembaga audit negara, BPK memandang penting SDGs dan memastikan bahwa keuangan negara dipertanggungjawabkan secara baik.

Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa sebagai institusi auditor, BPK harus meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas para pemangku kepentingan dalam menerapkan SDGs.

Salah satu pemangku kepentingan (*stakeholders*) penting dalam pelaksanaan SDGs adalah Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Kementerian PPN/Bappenas merupakan koordinator motor utama dalam pelaksanaan program ini.

*Warta Pemeriksa* berkesempatan untuk berbincang dengan Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Slamet Soedarsono. Ditemui di kantornya di Jakarta, belum lama ini, Slamet menjelaskan mengenai perkembangan terkini SDGs. Termasuk mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berikut kutipan wawancaranya.

### **Bagaimana Bappenas memandang perkembangan SDGs?**

Kami melihat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs itu dalam dua dimensi, yaitu dimensi tata kelola dan dimensi pencapaian targetnya. Dari unsur tata kelola kita melihat ada regulasi dan dokumen perencanaan. Apa itu regulasi? Yang paling menentukan adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 mengenai pelaksanaan pencapaian SDGs dan Peraturan Menteri PPN Nomor 7 tahun 2018 mengenai koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan SDGs.

Masih dalam dimensi tata kelola, telah disiapkan dokumen perencanaan secara berjenjang bertahap. Ada rencana pembangunan jangka menengah nasional, kita sedang siapkan RPJMN 2020-2024. Ini nanti akan disahkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah presiden dilantik, yaitu Januari 2020. RPJM nasional ini kemudian diterjemahkan oleh kementerian/lembaga dalam bentuk perencanaan strategis (Renstra) masing-masing. Pada saat yang sama RPJMN ini juga diterjemahkan dalam RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rencana strategis masing-masing OPD, dinas-dinas di daerah. Kemudian kita juga merumuskan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah. Untuk pelaksanaan SDG, selaras dengan RPJMN/RPJMD.

Selain tata kelola, kita juga melihat pencapaian target. Kita melihat ada ekonomi inklusif, misalnya. Dalam SDGs sejumlah sektor dikelola, antara lain kesehatan, pendidikan, kemudian elektrifikasi, emisi gas rumah kaca, perilaku antikorupsi. Kita bisa lihat tingkat rasio membaik, kemiskinan menurun, pendidikan, dan seterusnya membaik.

### **Apa peran Bappenas dalam proses itu?**

Ada sejumlah langkah yang dilakukan Bappenas. Selain menyiapkan dokumen perencanaan, kita juga ikut aktif pada saat penyusunan regulasi,



■ Slamet Soedarsono

misalnya penerbitan perpres. Itu kita menjadi motor utama sampai disetujui presiden. Kita juga melakukan pendampingan intensif dan membangun kerja sama multipihak. Mengapa ini penting? Karena salah satu prinsip SDGs itu adalah *no one left behind*, jadi semua harus diajak. Baik itu kementerian/lembaga, swasta, akademisi, media, LSM, semua. Makanya, kita tidak main-main untuk ini, kita lakukan kerja sama multipihak, kita bangun sistematikanya, tata kelolanya, dan sebagainya.

Kita juga menginisiasi kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta, melalui pengembangan SDGs Center. Universitas-universitas besar sudah melaksanakan ini. Kita mengajak serta masyarakat mulai dari perencanaan sampai memonitor dan mengevaluasi SDGs. Jadi tidak hanya direncanakan pemerintah, dievaluasi pemerintah, nanti kurang independen dan objektif. Makanya, pengawasan masyarakat ini menjadi penting sekali.

#### **Apa program prioritas Bappenas terkait SDGs ini?**

Mulai dari penyusunan dokumen perencanaannya. Kita juga melakukan upaya sungguh-sungguh terkait sinkronisasi anggaran. Bahwa salah satu tantangan kita itu adalah untuk sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Ada banyak contoh, misal, pelabuhannya lengkap dan siap beroperasi, tapi aksesnya bermasalah. Sehingga kadang-kadang agak mubazir. Atau dibangun pelabuhan bagus, jalannya juga bagus, tetapi jalan itu hanya bisa dilewati mobil kecil. Padahal setiap pelabuhan harus bisa diakses kontainer, mobil besar.

Persoalan ini *kan* tidak sederhana. Ada anggaran melibatkan anggaran nasional, anggaran provinsi, anggaran daerah dan seterusnya. Kita juga sangat serius berkaitan dengan *finance*. Karena kita sadari uang pemerintah itu terbatas, tetapi targetnya besar, karena memang itu amanahnya.

Karenanya, bukan kita mengu-

rangi target sasaran. Kita tetap bekerja dengan skema besar itu. Hanya saja, menambah dukungan mobilisasi *finance* tadi. Kita mobilisasi dengan sungguh-sungguh sehingga ada rasa memiliki untuk ikut mengawasi, untuk ikut memastikan bahwa tujuan-tujuan ini tercapai.

#### **Bagaimana dengan bidang pol-hukhankam?**

Yang menonjol adalah bantuan hukum. Sebetulnya, banyak sekali lapisan masyarakat yang pengetahuannya terbatas dalam bidang hukum. Kalaupun mengerti, mereka tidak bisa menjangkau karena berpikir urusan hukum itu tidak murah. Hanya bisa diakses orang-orang berduit.



Salah satu prinsip SDGs itu adalah *no one left behind*, jadi semua harus diajak.

Oleh sebab itu, ada bantuan hukum di sini. Kemudian juga akta kelahiran. Kita melihat masih ada masalah anak tidak punya akta kelahiran dan itu berimplikasi kepada pencatatan sebagai warga negara. Kita juga menggandeng MUI dan NU terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian perlindungan anak dan urusan tenaga kerja Indonesia.

Bappenas itu adalah koordinator, kita tidak bekerja sendiri. Kita prinsipnya kolaboratif. Bappenas itu orangnya terbatas, uang terbatas. Oleh sebab itu kita kolaboratif, kita mengajak, kita memberikan koridor, sehingga semua pihak bekerja pada trek yang sama.

#### **Ada upaya yang dapat dilakukan untuk menuju arah itu?**

Jadi, SDGs itu sesuai namanya, harus *sustainable*. Upaya-upaya yang *sustainable* itu mustahil tanpa akuntabilitas dan transparansi. Tanpa dua hal itu, keberhasilan berlangsung bisa jangka pendek, sifatnya semu.

Karenanya, akuntabilitas dan transparansi menjadi prasyarat untuk semua ikhtiar itu agar *sustainable* dan ada banyak kriteria menuju ke sana. Tapi setidaknya tercapai WTP (wajar tanpa pengecualian).

Jadi WTP itu merupakan pondasi awal. Setidaknya dapat menyusun laporan keuangan menurut standar. Meskipun kami melihat, sebenarnya tantangan sekarang lebih ke arah audit kinerja. Karena kalau kita amati, sebetulnya audit keuangan itu sudah lumayan bagus. Jauh lebih bagus dibanding periode sebelumnya.

Makanya, kita perlu bergerak ke arah audit kinerja. Pengawasan kinerja itu jauh lebih efektif menangkap koruptor daripada audit keuangan.

Kalau kementerian/lembaga level pusat memang sudah jauh lebih bagus. Tapi kita melihat tantangannya ada di provinsi dan kabupaten/kota. Kita melihat gubernur dan jajarannya, DPRD dan jajarannya, bupati dan jajarannya. Di sana masih jadi tantangan besar bagi kita semua untuk pembenahan serentak secara nasional.

Salah satu penyebabnya adalah SDM terbatas, terbatasnya pengelola keuangan. Karenanya, mungkin bisa diatasi antara lain dengan sistem IT. Dengan sistem yang bagus itu bisa mengkompensasi jumlah orang. Ada contoh konkret, misalnya Astra yang menambah agen baru, tapi jumlah auditornya malah menurun karena diganti teknologi.

#### **BPK menyampaikan bahwa masalah SDGs memang antara lain terkait hubungan vertikal antara pusat dan daerah. Bagaimana mengatasi agar pemerintahan daerah lebih efektif?**



Bappenas ini *scope of work*-nya perencanaan. Tugas seperti memperkuat akuntabilitas dan transparansi ini, lebih merupakan tupoksi BPKP didukung inspektorat K/L.

SDM adalah salah satu kuncinya. SDM itu memang secara nasional melalui BKN. Karena masih terpusat, jadi bisa diupayakan mobilisasi secara nasional, sebagai prioritas tinggi. Selain merekrut tenaga kerja profesional dengan kompetensi tinggi, juga perlu dilakukan pendidikan berkelanjutan. Kadang-kadang, dengan otonomi daerah, kepala biro keuangan itu sarjana agama. Sebenarnya, dari Aceh hingga Papua, itu sistemnya boleh dibilang sama. Tetapi mengapa ada daerah yang bagus dan ada yang bermasalah? Karena faktor orang.

Yang penting juga adalah pendampingan dari banyak pihak. Pertama bisa dari irjen Kementerian Dalam Negeri karena daerah itu wilayah mereka. Bisa dari irjen provinsi, kabupaten/kota, bisa juga dari BPKP.

Nah, kita berharap BPK berkenan buka kelas pelatihan untuk BPKP dan APIP yang jumlahnya terbatas. Sebagai pemeriksa, BPK itu tahu titik titik berisiko. Jadi *sharing* ilmu di bidang ini sangat penting bagi eksekutor agar menjadi rambu bagaimana bisa bergerak secara baik.

### **Sejauh mana Bappenas bisa menjangkau untuk bisa membantu mewujudkan target tadi?**

Bappenas ini *scope of work*-nya perencanaan. Jadi kalau tugas seperti memperkuat akuntabilitas dan transparansi ini, lebih merupakan tupoksi BPKP didukung inspektorat K/L. Kita lebih kepada membangun sistem perencanaan nasional yang memungkinkan semua kementerian/lembaga, semua

pihak, itu bekerja bersama sama untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Bagaimana *planning* ini bisa diwujudkan, bagaimana kolaborasi itu berlangsung, bagaimana sumber pendanaan itu bisa mendukung dan sebagainya, sampai situ. Tapi kalau secara riil membantu meningkatkan di lapangan, ini butuh akuntan top. Keterlibatan kita paling jauh adalah ketika melakukan *engagement* dengan kementerian/lembaga. Pada saat *trilateral meeting* setiap tahun. Bappenas dan Kemenkeu itu pasangan tetap. Sementara kementerian/lembaganya bergiliran membahas perencanaan penganggaran.

### **Koordinasi antar kementerian/ lembaga dan *stakeholders* lain juga menjadi penekanan dari BPK dalam konteks SDGs. Ada strategi dari Bappenas terkait hal ini?**

Berbicara mengenai LSM, misalnya. Itu jumlahnya banyak sekali. Satu cara yang kita lakukan adalah berkoordinasi dengan konsorsium tempat mereka bergabung. Kita serahkan mereka memutuskan perwakilannya sendiri untuk bekerja sama dengan Bappenas.

Kita juga tidak diam. Kita bangun yang namanya *multi stakeholders partnership*. Ada sistematikanya, ada manualnya. Ini semua adalah langkah menuju bagaimana mengkoordinasikan itu, langkah kolaboratif antara pemerintah dan nonpemerintah.

### **Bagaimana peran BPK menurut Anda?**

Koordinasi BPK dan pemerintah harus diakui makin baik. Ada *mutual respect* antara Presiden dan Ketua BPK. Ada *consultatif meeting* antara ketua BPK dan presiden. Kemudian juga saran BPK dan sebagainya itu kita terima.

### **Diskusi itu karena kondisi tiap lembaga berbeda?**

Justru itu. Ini banyak yang nonuang. Kalau uang itu kriterianya sudah lebih baku, ada SAP dan macam-macam. Tapi kalau nonuang itu perlu duduk bersama. Kadang uang pun, sebelum terjun ke lapangan BPK juga duduk dengan *auditee*. Misalnya mengukur ketebalan aspal. *Sampling* titik mana dan sebagainya. Itu BPK juga berdiskusi dengan *auditee*, menyepakati dulu, baru terjun ke lapangan.

Rekomendasi BPK yang kita terima itu kami tindak lanjuti. Misalnya disarankan SDGs itu harmoni atau sinergi dengan rencana kerja pemerintah. Ini kita tindak lanjuti dengan metodologi pengawasan yang mengintegrasikan konsep Continuous Audit/Continuous Monitoring (CACM). Sistem ini secara elektronik bisa disinergikan. Yang kedua selaras pusat dan daerah. Berkaitan dengan daerah, ini otoritasnya Kementerian Dalam Negeri. Ketiga, regulasi tentang satu data. Ada Peraturan Presiden baru mengenai satu data. Dulunya, jumlah penduduk saja angkanya berbeda. Padahal itu paling gampang dan impikasinya banyak. Ke arah subsidi pemerintah, *by name by address*, dan segala macam. Terbitnya Perpres ini, *insya Allah* akan lebih menyatu. Ini dampaknya besar terhadap

perencanaan karena bahan baku utama perencanaan itu data akurat dan mutakhir.

### **Bisa jelaskan lebih mengenai CACM?**

Saya ingin menganalogikan dengan kesehatan. Akuntabilitas dan transparansi itu mirip dengan kesehatan. Maksudnya, pada kondisi saat ini, kita kelihatan sehat. Mungkin lebih pas disebut tidak sakit. Bedanya, kalau kita naik ojek malam hari dan hujan, itu kemungkinan pada ujungnya kita rentan masuk angin.

Orang kalau sehat itu, mau naik truk juga tetap sehat. Ini ternyata kita tidak. Artinya kita itu sebenarnya pas-pasan. Makanya pengobatan itu sudah terlambat dan kita harus bergerak ke arah pencegahan. Mencegah agar tidak sakit. *Nah* sama, akuntabilitas juga begitu, melalui pencegahan. Kita lihat statistik bahwa penderita kanker dan sebagainya itu umurnya makin muda. Artinya apa? Kuratif jelas telat sehingga perlu promotif melalui pola makan dan pola hidup.

Ini juga begitu, di bidang akuntabilitas-transparansi, menurut saya juga perlu pembudayaan yang lebih dini. Mungkin sejak sekolah, sejak pegawai baru, tidak menunggu menjadi bos. CACM itu kami ibaratkan sebagai CCTV. Jadi begitu CCTV dipasang, kita ini sudah agak beda perilakunya. Lebih hati-hati karena merasa dimonitor.

CACM juga begitu. Saat ini kami terapkan terbatas di Bappenas. Jadi masing-masing dalam melakukan pekerjaan makin hati-hati karena langsung dipantau inspektorat. Tidak akan sembarangan lagi seperti sebelumnya pada saat masih manual. Promotif itu maksudnya antara lain seperti itu.

*By system.* Kita harus menuju sana, harus seperti itu. Apalagi, berdasarkan penelitian, sebetulnya tingkat teknologi kementerian/lembaga sudah memadai. Malah cenderung kapasitas besar, canggih, tapi yang dipakai terbatas. Sehingga kalau ditambah, misalnya fungsi CACM, sebetulnya masih me-

mungkinkan mengubah apa-apa.

### **Sementara ini baru di Bappenas?**

Bappenas, Kemenkeu, dan delapan kementerian/lembaga lain secara terbatas. Tapi kita terus terang termasuk awal. Kemenkeu sendiri mengapresiasi Bappenas karena kita termasuk inisiator awal. Untuk mengakselerasinya diperlukan peran BPK dan DPR berkenan terkait ini.

Karena apa? Kalau saya menyarankan ubah regulasi, itu lama lagi pula sudah *over regulated*. Tapi kalau BPK, itu setiap tahun mengaudit seluruh kementerian/lembaga dan daerah. Andaikan BPK merekomendasikan penerapan CACM. Akan efektif setiap rekomendasi BPK dikerjakan dalam 60 hari.

Karenanya, kami ingin masuk lewat situ, mohon berkenan. Meskipun dengan regulasi yang ada, tapi kalau BPK menyepakati, menyamakan persepsi bahwa pemanfaatannya itu besar, biasanya relatif tidak ada.

Yang kedua DPR. Kita lihat setiap rapat dengar pendapat DPR dengan menteri. Apakah ada rekomendasi yang tidak ditindak lanjuti dalam rapat itu? Tidak harus ada undang-undang baru. Hanya disarankan agar diterapkan. Dan ini bukan menyebut nama merek, ini sebuah teknologi generik.

### **Bagaimana Bappenas memandang transisi dari MDG's menuju SDGs?**

MDG's dan SDGs itu sebetulnya sebuah *shifting paradigm*. Itu perubahannya untuk penyempurnaan. Karena yang namanya MDG's itu fokusnya pada dimensi sosial. Sementara SDGs lebih komprehensif mencakup ekonomi, lingkungan hidup, hukum dan tata kelola. Misalnya dengan kaidah *no one left behind*. Dulu kita sudah mengajak *stakeholders*. Tapi dengan kata-kata *no one left behind* menjadi lebih tajam. Jangan sampai ada yang tidak diajak.

Kemudian juga dulu dalam rencana lima tahunan RPJM, MDGs itu semacam pengarusutamaan, semua

sektor ada. Tapi sekarang lebih tegas, itu menjadi bagian dari RPJM, menyatu dengan RPJM. Sama halnya semua janji-janji presiden harus dimuat dalam RPJM. *Nah* SDGs juga begitu. SDGs itu ada ratusan indikator. Itu dipastikan ditulis, dipastikan diukur, dipastikan dipantau. *Nah* itu sudah lebih tegas antara pergeseran dari MDGs ke SDGs, yaitu komitmen yang lebih kuat.

### **Ada harapan lain buat BPK terkait pemeriksaan sehingga bisa memicu WTP lain di kementerian/ lembaga?**

Kami sangat apresiasi bahwa BPK bergerak dari pemeriksaan keuangan ke kinerja. Kemudian BPK juga berkenan untuk diskusi mengenai kriteria. Itu mencerdaskan, itu mencerahkan. Kami juga mengusulkan BPK agar berkenan untuk banyak berbagi pada tahap promotif tadi itu.

Mohon maaf, sebagian kalangan BPK kalau diajak bicara desain dan sebagainya, kadang masih membatasi diri. Alasannya karena itu domain eksekutif. Padahal kita juga paham bahwa ada batasannya. Kita juga paham, tapi harusnya lebih cair lagi. Presiden bertemu dengan Ketua BPK tidak hanya pada saat penyerahan laporan keuangan. Tapi juga ada diskusi untuk membangun pemahaman yang lebih baik, untuk menyamakan persepsi.

Karena terus terang, auditor di pemerintah itu kapasitasnya masih terbatas. Kalau BPK banyak memberi ilmu, maka itu bisa jadi *capacity building* buat eksekutif.

Begitu juga ketika mendapat temuan. Saya berharap BPK karena cangih dan tajam menentukan temuan, maka bisa cangih dan tajam juga dalam memberikan opsi jalan keluarnya. Para anggota tim perlu dibekali *skill* dan *knowledge* yang cukup untuk merumuskan opsi kebijakan.

Nanti dilihat, dikaji lagi oleh eksekutor itu kelayakannya. Tantangan seperti itu yang mungkin perlu ditingkatkan oleh BPK, yaitu dengan *capacity building*. ●

# Ekstra Sabar Berbuah Keindahan Sorong

Meskipun berbeda-beda suku, namun masyarakat setempat memiliki karakter khas, yaitu ramah terhadap pendatang.

Sebagai seorang pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpindah tempat tugas merupakan hal yang biasa. Kantor perwakilan BPK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membuat pegawai BPK memiliki banyak pengalaman menjelajahi Tanah Air. Seperti yang dialami Musa Amirul (27 tahun) yang mendapat kepercayaan untuk bertugas di Sorong, Papua Barat.

Baginya, Sorong menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan pemeriksaan. Di kota ini Musa harus melatih *communication skill*-nya saat bekerja dengan pegawai pemerintah setempat. "Karena harus memahami terlebih dahulu karakter dari pegawai



■ Bukit Baru



■ Pemandangan Senja di Tembok Berlin Sorong

setempat untuk pemeriksaan lebih lancar," kata pegawai BPK yang bertugas sebagai pemeriksa pertama subauditorat Papua Barat I BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat tersebut kepada *Warta Pemeriksa* di Jakarta, belum lama ini.

Musa menjelaskan, kesulitan itu lantaran kesibukan pegawai pemda di Kota Sorong yang padat. Meskipun begitu, tantangan tersebut tetap dihadapi. Tim BPK pun selalu berusaha berkomunikasi dengan pegawai pemda hingga keperluan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan telah lengkap.

## Kompak dan solid

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi sehari-hari, Musa memiliki beberapa solusi. Antara lain, memastikan bahwa tim yang bekerja bersama selalu dalam kondisi kompak dan solid. Dengan tim seperti ini, maka segala tantangan menjadi lebih mudah dilalui.

Pekerjaan berat yang ditambah

dengan kondisi anggota tim yang jauh dari keluarga, menjadi lebih ringan untuk dijalani. Tim BPK di Sorong selalu berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari semua masalah yang dihadapi.

Memang, selain menghadapi kesulitan dari pegawai pemda setempat, berada jauh dari keluarga menjadi hal yang berat. "Karena kita merasa sama-sama jauh dari keluarga, jadinya dirasakan sama-sama saja. Kita tetap berusaha untuk riang dan semangat untuk bekerja. Jadi profesionalisme tim tetap terjaga," ungkap dia.

Untuk mengatasi rasa rindu keluarga, ujar Musa, tim BPK di Sorong juga tertolong oleh pemandangan sekitar kota yang indah. Saat memiliki waktu senggang dari rutinitas pemeriksaan, tim mencoba menikmati objek wisata Sorong. Ini merupakan pengalaman yang tak bisa dinikmati oleh semua orang.

"Memang, tempat kita ditempatkan itu dekat dengan objek wisata yang ada di Kota Sorong. Bahkan, dekat juga dengan Raja Ampat. Jadi saat





■ Pulau Matan

pekerjaan senggang, kita sempatkan untuk berwisata ke sana," papar dia.

Selain pemandangannya yang indah, hal lain yang menjadi pengalaman berkesan Musa adalah karakter masyarakat Sorong. Dia menjelaskan, masyarakat Sorong yang terdiri dari beberapa suku, antara lain suku Moi dan Kokoda. Meskipun berbeda-beda suku, namun masyarakat setempat memiliki karakter khas, yaitu ramah terhadap pendatang. "Jika kita bersikap baik, warga Kota Sorong akan lebih baik lagi kepada kita. Makanya, selagi kita bersikap baik, maka hidup di tengah masyarakat Kota Sorong itu terasa nyaman," papar dia.

Apalagi jika bicara soal urusan makanan, Sorong juga tidak kalah dengan kota-kota lain di Tanah Air. Ini tak lain karena Sorong merupakan kota terbesar kedua di Papua setelah Jayapura. Hal ini ditambah dengan posisi Sorong yang merupakan kota strategis karena letaknya yang merupakan pintu keluar-masuk dan transit untuk menuju provinsi Papua Barat.



■ Cek fisik Pasar Rufe



■ Drainase Jalan Anggrek

### Dada tuna

Sebagai kota industri, perdagangan, dan jasa, Sorong banyak memiliki rumah makan. Segala macam jenis makanan ada di kota ini. Ada restoran yang menyajikan makanan Padang. Ada pula yang rumah makan prasmanan yang biasa ditemui di lingkungan sekitar perkantoran Jakarta.

"Di provinsi Papua Barat, Sorong itu dikenal sebagai kota minyak. Jadi, jangan bayangkan Sorong sebagai daerah yang tertinggal, seperti beberapa daerah di tanah Papua lain. Malah, Sorong tidak beda dengan kota besar lainnya di Indonesia," kata Musa.

Karenanya, Musa bersama tim BPK yang lain tidak merasakan perbedaan



■ Drainase Jalan Anggrek

selera jika berbicara mengenai makanan. Apalagi, harganya juga tidak jauh berbeda dengan ibu kota. "Biasanya sekali makan di kota Sorong, saya menghabiskan sekitar Rp30 ribu," ujar Musa menambahkan.

Sebagai referensi bagi siapapun yang berencana datang ke Sorong, Musa menyarankan makanan favoritnya di kota itu. Makanan khas tanah Papua yang dia sukai adalah dada tuna dan ikan kuah kuning yang disantap dengan papeda.

Dada tuna, jelas dia, merupakan masakan dengan bahan ikan tuna yang dipotong menyerupai *steak* daging dan dibakar. Makanan ini disajikan dengan sambal kacang dan sambal pedas. "Seperti *steak*, rasa dada tuna juga ada *juicy gitu*," ujar dia.

Sementara seperti namanya, kuah kuning dan papeda merupakan masakan dengan bahan ikan merah yang dimasak dengan bumbu-bumbu kuning. Menu ini disajikan dengan papeda atau bubur sagu. Penyajiannya yaitu piring makan diberi kuah kuning dan kemudian dimasukkan papeda yang digulung sesuai porsi.

Urutan agar kuah kuning dimasukkan lebih dulu merupakan hal penting. Karena papeda yang dimasukkan lebih dulu, maka akan lengket dan menempel ke piring. "Cara makannya itu unik. Jadi, papeda dan kuah kuning ditelan bersamaan tanpa dikunyah," kata dia.

"Untuk tuna, harganya sekitar Rp40 ribu per porsinya. Sedangkan kuah kuning ditambah papeda biasanya mulai dari Rp150 ribu sampai Rp200 ribu. Lebih mahal, tapi bisa untuk dimakan ramai-ramai bersama dengan teman," cerita Musa. ●



■ Pulau Raam

# Bisnis Kurban yang Berawal dari Cinta



■ Sarjono dengan sapi limousin yang dijual.

Pengalaman kegagalan justru dijadikan pelajaran untuk lebih mantap lagi meneruskan bisnis tersebut.

Dul Adha tidak hanya menjadi momentum penuh berkah bagi para jamaah yang menjalani ibadah haji di tanah suci. Di Tanah Air, banyak orang yang juga ikut merasakan nikmatnya perayaan hari raya kurban. Seperti yang dirasakan oleh para penjual hewan kurban.

Sarjono juga ikut merasakan keuntungan dari meningkatnya permintaan hewan kurban seperti sapi, kambing, dan domba. Kepada *Warta Pemeriksa*, pegawai auditorat keuangan negara (AKN) I Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ini berbagi kisah terkait bisnis sapi yang sudah dijalannya selama tujuh tahun.

Awalnya, Sarjono tak pernah berpikir akan menjalani bisnis hewan kurban di tengah kesibukannya sebagai pegawai BPK. Ketika itu, dia hanya memiliki kecintaan dan hobi memelihara domba garut.

Alasannya tak lain karena tampilan fisik domba garut yang gagah. Bahkan, dia gemar mengikuti kontes domba. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dia merasa bahwa hobi tersebut tidak murah dan secara finansial tidak menguntungkan.

"Dulu, saya memang suka sama domba garut. Bahkan dulu itu sempat kita ada 60 ekor domba buat kontes. Hanya domba garut itu dulu lebih banyak ke hobi, jadi malah banyak mengeluarkan dana, malah jadi *ngeluarin* duit terus, *nggak* ada pemasukan," kata Sarjono.

Terlanjur cinta dengan dunia hewan ternak, baru pada 2012 Sarjono memutuskan untuk mencoba peruntungannya di bisnis sapi. Dia pun mencoba *kulakan* sapi saat sedang menjalani pendidikan dan pelatihan di Yogyakarta.

Pertama kali merintis, tepatnya mendekati bulan puasa, dia membeli satu truk sapi yang berjumlah 12 ekor. Sapi tersebut dibeli dari tengkulak sapi di Solo yang lantas dikirim ke Bogor untuk disimpan dan dijual. Ini merupakan lahan yang digunakan untuk domba.



Percobaan perdana berbisnis sapi itu tidak berjalan mulus. Karena minim pengalaman, alih-alih untung dia malah mengalami kerugian. Dari 12 ekor sapi yang dijual menjelang Idul Adha, hanya terjual dua ekor. Sisanya terpaksa dijual murah ke rumah potong hewan (RPH) untuk memasok pedagang daging sapi.

"Ternyata bisnis itu memang tidak mudah. Pada awal, banyak jatuhnya. Yang 10 sapi kita jual ke RPH itu harganya jatuh karena momennya sudah *nggak* Idul Adha," jelas dia.

Tak hanya itu, Sarjono juga mendapat cobaan lain. Kali ini muncul dari para pedagang daging sapi yang diajak kerja sama yang tidak lancar menyeter pembayaran hasil penjualan daging sapi.

Akan tetapi, Sarjono tidak patah semangat. Pengalaman itu justru membuatnya semakin penasaran dan

ingin mencoba lagi. Pengalaman yang ia alami justru dijadikan pelajaran untuk lebih mantap lagi meneruskan bisnis tersebut.

Hal ini tidak lepas dari kecintaan terhadap hewan dan keyakinannya melihat peluang. Dia pun kembali membeli sapi dari Solo dan Boyolali untuk dikirim ke Bogor. Melihat pengalaman, dia pun memutuskan menjual sapi dengan sistem tunai. Sarjono hanya akan menjual sapi utuh per ekor. Jika ada uang tunai, baru dia mengeluarkan sapi dari kandang.

Dengan cara tersebut dia merasa akan lebih aman dalam menjual sapi. Dia pun berpikir ulang untuk bekerja sama lagi dengan pedagang daging. "Dalam berbisnis kita harus menemukan orang yang tepat dan bisa dipercaya untuk bekerja sama. Kalaupun ingin menjual daging sapi saya lebih memilih punya kios sendiri

dan karyawan sendiri ketimbang harus bekerja sama," tambah dia.

### Ada uang ada barang

Dengan sistem 'ada uang ada barang' tersebut, Sarjono berhasil menjalankan bisnis sapi dengan lebih aman. Bahkan kini tidak hanya di Bogor saja, dia juga menyewa kandang sapi di Purwakarta, khususnya ketika menjelang Idul Adha.

Hampir setiap bulan Sarjono memasok satu truk sapi dari tengkulak di Solo dan Boyolali. Jenis sapi pun beragam. Mulai dari limousin, simental, brangus, dan peranakan ongol. Harganya per ekor juga bervariasi, mulai dari Rp20 juta untuk satu ekor sapi yang memiliki berat 330 kilogram (kg). Hingga yang paling mahal yaitu Rp60 juta untuk satu ekor sapi seberat satu ton. Setiap menjelang Lebaran Haji, Sarjono merasakan berkah hingga mencapai 30-40 ekor sapi. Walaupun tidak mau menyebut angka pasti, berbisnis sapi disebutnya sangat menguntungkan.

Meskipun begitu, Sarjono berbagi tips strategi dalam berbisnis sapi. Menurutnya, untuk mendapatkan margin yang tinggi, pedagang harus tahu kapan waktu membeli sapi yang tepat. Disarankan untuk membeli sapi dari pasar atau petani pada waktu menjelang bulan puasa atau menjelang tahun ajaran baru. Pada waktu-waktu itu, para peternak sedang membutuhkan biaya yang besar, sehingga harga jual mereka lebih murah dari hari biasa.

"Sebetulnya di bisnis sapi ini kalau kita tahu kapan *timing*-nya kita harus belanja, itu menguntungkan *banget*. Kita belanja itu pas waktu orang-orang butuh dana. Belanja pada saat itu dan kita besarkan tiga sampai empat bulan. *Insyah Allah* dapat margin besar," papar dia.

Saat ini, Sarjono tidak hanya memasok sapi dari Solo dan Boyolali. Dia mulai mencoba untuk menernak sapi sendiri. Sudah sekitar tiga tahun terakhir ini dia mencoba penggemukan. Dia membeli sapi-sapi umur setengah sampai satu tahun untuk dibesarkan di Bogor. Dengan cara ini, dia mendapatkan harga

beli Rp12 juta sampai Rp13 juta. Setelah siap, dia bisa menjualnya kembali dengan harga Rp20 juta sampai Rp60 juta, tergantung berat masing-masing sapi.

### Persaingan pakan

Dia menjelaskan, tantangan dalam berbisnis sapi adalah pakan. Di Bogor, sebagai lokasi incaran pengusaha sapi skala besar, terjadi persaingan ketat dalam urusan mencari pakan. Jika belum memiliki lahan rumput sendiri, maka akan lumayan berat.

Sarjono merasa bersyukur memiliki kandang sapi di Ciapus, Bogor yang tepat di bawah kaki Gunung Salak dan masih cukup banyak lahan hijau. Akan tetapi ke depan dia ingin memiliki lahan rumput sendiri sehingga tidak perlu berebut rumput dengan para pemilik sapi lain.

Untuk mengurus dan memberi makan sapi-sapi itu setiap hari, dia pun mempekerjakan pegawai. Dia hanya sesekali mengunjungi kandang. Itu pun jika ada pembelian atau sedang ingin melihat sapinya sambil bersepe- da dari rumah sebagai *refreshing* dari rutinitas pekerjaan.

Kebetulan, rumahnya yang terletak di Ciomas tidak jauh dari lokasi kandang sapi miliknya. "Saya paling



■ Sarjono

dua atau sebulan sekali ke peternakan. Atau kalau perlu, sepekan sekali ke situ sambil *gowes*," ungkap Sarjono.

Meski ingin mencari keuntungan materi, Sarjono mengatakan memiliki misi lain dari bisnis sapi yang dijalankan. Yaitu, untuk bisa membuka pintu rezeki dengan orang yang bekerja mengurus sapi.

"Uang itu kalau ditaruh di bank, *ngga* punya nilai tambah. Adapun bunganya itu jelas riba. Kalau ditaruh di usaha yang riil seperti sapi, kita bisa menghidupi jalan rezeki. Minimal untuk orang yang kerja dengan kita. *Insyallah* nanti kita juga dapat untung dari sana. Itu saja misi saya," tuturnya. ●



Kalaupun ingin menjual daging sapi saya lebih memilih punya kios sendiri dan karyawan sendiri ketimbang harus bekerja sama.

## Tips Bisnis Kurban

Sarjono berbagi tips untuk siapapun yang ingin menjalankan bisnis sapi. Yang paling utama adalah memiliki lahan untuk tersedianya pakan (rumput dan jerami) makan sapi. Kedua adalah memilih orang yang jujur dan dapat dipercaya untuk mengurus dan merawat sapi. Hal ini penting jika kita tidak bisa terjun langsung setiap hari karena memiliki pekerjaan lain.

Dia meyakinkan bahwa menjual sapi merupakan bisnis yang menjanjikan. Hal ini karena bisa membuka peluang untuk mencari keuntungan lain. Yang diperlukan adalah kejelian untuk melihat peluang yang ada.

Selain penjualan sapi utuh, pedagang juga bisa memanfaatkan nilai tambah yang dimiliki sapi. Mulai dari pembuatan kompos dan pupuk dari kotoran sapi hingga pemanfaatan susu. "Ke depannya saya juga punya rencana

ingin membuat kompos dari kotoran sapi. Itu punya nilai tambah dari situ," papar dia.

Kepada rekan-rekan BPK, khususnya yang ingin memulai bisnis, dia berpesan agar mencoba bisnis sejak dini. Selain sebagai bentuk investasi aset, langkah ini bisa juga sebagai investasi jangka panjang setelah pensiun.

Menurut Sarjono, jika memulai bisnis ketika mendekati atau saat pensiun, maka risiko kegagalan atau berhenti di tengah jalan jauh lebih besar. Hal ini karena semua bisnis ada momentum untung dan rugi. Jika rugi pada saat pensiun, maka tentu modal yang dimiliki untuk memulai kembali tidak sekuat saat masih memiliki pemasukan lain. "Jangan pernah takut mencoba. Kendala itu pasti ada dalam setiap usaha. Tapi itu merupakan pelajaran dari alam. Pelajaran kehidupan sesungguhnya itu di lapangan," ujar dia. ●

# Yuk Gabung dengan Komunitas Foto BPK



■ Foto-foto karya Komunitas Foto BPK

Komunitas tak hanya bisa diikuti bagi yang memiliki kamera DSLR. Pegawai yang memiliki hobi foto menggunakan ponsel juga dipersilakan bergabung.

**D**i era digital saat ini, hampir semua orang menggunakan media sosial. Selain untuk berinteraksi dengan banyak orang atau sekadar berbagi cerita, hal lain yang paling sering diunggah adalah foto. Semakin banyaknya *platform* media seperti Instagram dan Facebook membuat orang kian gemar berbagi foto dan mengasah kemampuan fotografi.

Fenomena sosial itu pula yang melatarbelakangi terbentuknya Komunitas Foto BPK (KFBPK). KFBPK diinsiasi oleh pegawai BPK di Subdirektorat Konsultasi Hukum Keuangan Negara Ditama Binbangkum, Hendra Arieska Putra.

Hendra yang memiliki hobi fotografi mengatakan, ia membentuk komunitas foto karena ada begitu banyak pegawai BPK yang memiliki hobi sama seperti dirinya. Ia membuat komunitas foto tersebut dengan memanfaatkan *platform* Facebook pada 2013.

Sebelumnya, menurut Hendra, sudah ada komunitas foto di BPK. Namun, anggotanya tidak banyak karena kesibukan yang berbeda antara satu anggota dan yang lainnya. Sehingga, aktivitas komunitas foto terdahulu kurang terlihat.

“Waktu itu pada Mei 2013 mencoba menginisiasi untuk membentuk satu lagi komunitas yang berbasis media sosial yaitu Facebook untuk memudahkan komunikasi. Karena kita tahu kan pegawai BPK ini tersebar di beberapa pulau dan provinsi, untuk menggabungkannya itu kita menggunakan wadah. Apalagi, hampir semua orang punya akun Facebook. Jadi kita bikin grup Facebook agar dapat mencakup banyak orang di berbagai tempat.” Katanya.

Anggota KFBPK sudah mencapai 484 orang. Komunitas tak hanya bisa diikuti bagi yang memiliki kamera DSLR. Pegawai yang memiliki hobi foto menggunakan ponsel juga dipersilakan bergabung. Bahkan menurutnya, tidak jarang pegawai BPK yang hobi memburu foto menggunakan ponsel memiliki hasil yang bagus. “Di dalam komunitas ini ada beragam alat dan genre fotografinya. Selama memang berkaitan dengan bidang fotografi, tidak ada batasan di dalam komunitas ini. Bahkan semakin beragam hal terkait foto yang ada di komunitas ini semakin banyak yang bisa di-*sharing* bagi para anggota komunitas,” katanya.



## ALAMAT MEDIA SOSIAL KOMUNITAS FOTO BPK



Instagram:  
**KF.BPK**



Facebook:  
**KFBPK**

Sampai saat ini KFBPK masih aktif. Namun, ada kalanya anggota komunitas aktif berbagi foto dan berinteraksi. Ada kalanya juga sepi, khususnya ketika sedang periode pemeriksaan.

KFBPK juga aktif di grup Whatsapp. Anggota komunitas sering melakukan diskusi terkait teknik fotografi, menganalisis hasil jepretan, dan lainnya. Menurutnya diskusi ini hal yang diharapkan dari terbentuknya komunitas foto.

Selain *sharing* dan diskusi foto di media Facebook atau Whatsapp. KFBPK sering mengadakan *hunting* foto *landscape* dan *cityscape*. Namun, kegiatan yang paling sering dilakukan adalah *hunting* foto di *rooftop*.

Kata dia, komunitas foto juga sering diminta menjadi fotografer untuk acara-acara. Salah satunya pernah diminta mendokumentasikan acara perayaan ulang tahun pernikahan salah satu pejabat di BPK.

"Kalau *hunting* yang resmi kita pernah buat, masih di sekitaran Jakarta, yaitu Monas dan HI. Pernah juga kita diminta untuk memotret pejabat di BPK, waktu itu sedang melakukan perayaan ulang tahun pernikahannya."

Walaupun KFBPK belum terdaftar secara resmi di BPK, namun hal tersebut tidak membuat antusias dan keseriusan anggota komunitas menurun. Sebab, KFBPK sifatnya hanya untuk wadah berbagi ilmu dan pengalaman bagi sesama pencinta fotografi. Ia berharap ke depan komunitas ini menjadi komunitas yang resmi terdaftar di BPK.

Karena belum resmi terdaftar di BPK, KFBPK pun belum memiliki pengurus yang resmi. Akan tetapi, karena KFBPK ia yang menginisiasi, maka saat ini dirinyalah yang menjadi admin sambil menunjuk beberapa teman di perwakilan untuk juga menjadi admin.

Menurut dia, ada beberapa manfaat jika bergabung di KFBPK. Pertama, menambah jaringan antara sesama para penggemar fotografi. Kemudian, bisa melakukan *hunting* foto bersama. Lalu, bisa berbagi ilmu dan diskusi tentang apapun terkait fotografi.

"Dari situ, tentu anggota komunitas akan dapat menambah pengetahuan lebih banyak lagi tentang dunia fotografi," ujar dia.



KFBPK berencana membuat komunitas ini menjadi lebih besar dengan menjadikannya organisasi yang resmi. Jika sudah resmi, kata dia, kegiatan KFBPK akan lebih leluasa dan dapat menjangkau sponsor-sponsor untuk berbagai kegiatan, misalnya mengadakan *workshop* fotografi.

Selain itu, KFBPK ingin mengadakan pameran foto hasil dari karya anggota komunitas. Juga membuat lomba foto yang sudah lama sekali tidak diadakan karena kesibukan para pegawai dalam menjalani pekerjaan.

"Dalam waktu dekat ini kita akan mulai lagi (Lomba foto). Jadi kita berikan waktu beberapa pekan bagi teman-teman mengambil foto terkait tema tertentu. Katakanlah tema lingkungan, jadi kita serahkan teman-teman untuk mengambil foto. Apapun fotonya dari genre apapun interpretasinya adalah lingkungan. Untuk saat ini, itu yang kita lakukan agar teman-teman tetap memotret dan *sense*-nya makin terbentuk dan foto yang terbaik kita akan diskusikan dan akan di *repost* di IG nya KFBPK," ujar Hendra.

Ia berpesan kepada rekan-rekan BPK di berbagai daerah yang memiliki hobi fotografi bisa bergabung dengan KFBPK. "Daripada kita berjalan sendiri, lebih baik kita bergabung dalam satu komunitas. Setidaknya kita bisa membangun jaringan sesama pencinta fotografer. Sehingga kita bisa membuat sesuatu yang lebih besar, misalnya pameran atau kegiatan lainnya," ujarnya. ●



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



@humasbpkri.official



BPK RI Official



@bpkri



www.bpk.go.id



@bpkriofficial

### Tugas BPK

BPK adalah lembaga  
negara yang bertugas  
memeriksa  
pengelolaan dan  
tanggung jawab  
keuangan  
negara

# BPK Gelar Seminar Migas

BPK dalam melakukan pemeriksaan membedakan secara tegas kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang timbul karena risiko bisnis dan kerugian BUMN yang timbul karena perbuatan melawan hukum

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan seminar nasional bertema "Memetakan Makna Risiko Bisnis Dan Risiko Kerugian Keuangan Negara di Sektor Minyak dan Gas Bumi" di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (22/7). Seminar tersebut digelar untuk memberikan gambaran mengenai makna risiko bisnis dan risiko kerugian keuangan negara di sektor minyak dan gas bumi (migas).

Anggota IV BPK Rizal Djalil yang bertindak sebagai pembicara utama dalam seminar ini mengatakan, risiko bisnis dan risiko kerugian keuangan negara merupakan dua hal berbeda, namun dapat bersinggungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kepastian



■ Para pembicara Seminar Nasional.

hukum untuk mempertegas tanggung-jawab tersebut.

Ia menjelaskan, untuk menghindari risiko pidana bagi Chief Executive Officer (CEO) migas, perlu diatur prosedur pengambilan keputusan bisnis yang melibatkan direksi dan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). "Konkretnya perlu dibuat regulasi berupa Peraturan Menteri BUMN terkait dengan keabsahan rapat

Board of Director (BOD) dan juga rapat Dewan Komisaris," kata Rizal.

Pada kesempatan tersebut, Rizal juga menjelaskan bahwa BPK dalam melakukan pemeriksaan membedakan secara tegas kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang timbul karena risiko bisnis dan kerugian BUMN yang timbul karena perbuatan melawan hukum. "Kerugian BUMN yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum inilah yang disebut sebagai kerugian negara," tegasnya. Adapun kerugian BUMN yang timbul karena risiko bisnis tidak disebut sebagai kerugian negara, melainkan sebagai kerugian bisnis.

Seminar Nasional ini tak hanya dihadiri Anggota IV BPK. Hadir pula sebagai narasumber yaitu Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Guru Besar Teknik Produksi Perminyakan Institut Teknologi Bandung Tutuka Ariadji. Sementara, yang bertindak sebagai moderator adalah Effendi Ghazali dan Tina Talisa. Seminar ini juga dihadiri oleh para pejabat tinggi madya dan pratama serta para pemeriksa di lingkungan BPK. ●



■ Anggota IV BPK bersama Menteri ESDM.



# AKN V dan AKN VI Matangkan Pemeriksaan Kinerja Tematik

Tema pemeriksaan yang diambil adalah Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam rangka Peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempersiapkan pemeriksaan pendahuluan kinerja tematik bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Persiapan pemeriksaan pendahuluan tersebut ditandai dengan dilaksanakannya Workshop Persiapan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Tematik di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) V dan AKN VI BPK, di Jakarta, Rabu (3/7).

Pada kegiatan yang dilaksanakan pada 3-5 Juli 2019 tersebut, Anggota V BPK Isma Yatun hadir untuk membuka secara langsung sekaligus memberikan pengarahan kepada para peserta. Dalam sambutannya, Isma Yatun mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan agar para peserta yang terdiri atas pemeriksa di lingkungan AKN V dan AKN VI dapat berdiskusi mengenai apa yang harus dilakukan selama melaksanakan pemeriksaan pendahuluan. Sehingga, pemeriksaan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

"Saya selalu berharap adanya sinergi dan koordinasi antara AKN V dan AKN VI yang terus terjalin dengan baik dan kuat. Sehingga kita dapat melaksanakan pemeriksaan ini dengan sebaik-baiknya, mulai dari penyusunan program pemeriksaan hingga penyusunan laporan," ungkapnya.

Anggota V BPK juga menegaskan bahwa pemeriksaan kinerja tahun



■ Anggota V BPK, Isma Yatun bersama peserta *Workshop* Persiapan Pemeriksaan Pendahuluan.



■ Anggota VI BPK Harry Azhar Azis

2019 ini telah sejalan dengan Rencana Strategis BPK Tahun 2016–2020.

Adapun tema yang diambil adalah Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Penye-

lenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam rangka Peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun.

Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Dori Santosa dalam laporannya menyampaikan bahwa *workshop* terbagi dalam dua sesi, yaitu sesi *sharing* pengetahuan dari narasumber yang berasal dari para pemangku kepentingan dan sesi diskusi kelompok. *Workshop* ini dihadiri sebanyak 200 orang, yaitu Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Tim Pokja Pemeriksaan Kinerja Tematik.

Pemeriksaan kinerja ini akan melibatkan sekitar 627 pemeriksa yang terdiri atas pemeriksa di lingkungan AKN VI BPK dan pemeriksa dari 32 Perwakilan BPK, yaitu 18 Perwakilan BPK wilayah Timur serta 14 Perwakilan BPK wilayah Barat. ●

# Tahukah Anda Penerapan Manajemen Risiko di BPK?

Tata Cara Pengisian Form Sesuai Pedoman Manajemen Risiko – Seri 1



OLEH **DEDY**

Anggota Tim Penyusun  
Manajemen Risiko

Disupervisi oleh Inspektur Utama BPK

Di edisi ini, akan dibahas lebih lanjut bagaimana cara-cara penerapan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penerapan MR di Lingkungan BPK.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memulai penerapan Manajemen Risiko sejak 2018 yang ditandai dengan ditetapkannya Surat Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan BPK dan Surat Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK; yang kemudian diikuti dengan penandatanganan Piagam Manajemen Risiko pada 25 September 2018.

Pada Warta BPK bulan Januari 2019, telah dijelaskan bagaimana asal muasal atau kronologis penyusunan Manajemen Risiko (MR) di lingkungan BPK. Saat ini, akan dibahas lebih lanjut bagaimana cara-cara penerapannya sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Penerapan MR di Lingkungan BPK. Dalam Pedoman tersebut Tahap Implementasi Manajemen disusun sebagai berikut:

1. Piagam Manajemen Risiko
2. Formulir I Konteks Manajemen Risiko
3. Manual Indikator Risiko Utama

4. Formulir II. Peta dan Profil Risiko
5. Formulir III. Penanganan Risiko
6. Formulir Rencana Kontigensi
7. Formulir IV. Laporan Pemantauan Semesteran
8. Formulir V. Laporan Pemantauan Tahunan

Dalam Sesi 1 ini, akan dibahas bagaimana cara pengisian dari Piagam MR sampai dengan Formulir II. Peta dan Profil Risiko.

A. Pada tahap pertama penerapan MR adalah komitmen dari Para Kepala Satuan Kerja Pemilik Risiko (SKPR) yang dituangkan dalam bentuk Piagam setiap tahunnya. Para Kepala SKPR terdiri Level BPK *Wide*, Level Eselon I dan Level Eselon II. Piagam MR berisi tentang Komitmen untuk menerapkan MR, pelaksanaan MR yang melibatkan seluruh Pelaksana pada SKPR yang di lingkungan masing-masing, penyusunan rencana aksi penanganan dan pelaksanaan pemantauan dan reviu berkala untuk meningkatkan efektivitas MR di lingkungan SKPR dimaksud. Berikut adalah contoh Piagam MR tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Pedoman MR pada Lampiran III.1.



Gambar 1. Piagam Manajemen Risiko Eselon I - Inspektur Utama



Gambar 2. Piagam Manajemen Risiko Eselon II Inspektorat PIMK

B. Pada tahap kedua adalah penyusunan Konteks MR di lingkungan masing-masing SKPR (Lampiran III.2 – Formulir I. Konteks Manajemen Risiko).

Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK

LAMPIRAN III.2 : KEPUTUSAN BPK – RI  
 NOMOR : 7/K/I-XIII.2/9/2018  
 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2018

Formulir Konteks Manajemen Risiko

Formulir I - Konteks Manajemen Risiko

Unit Organisasi : (Diisi dengan nama SKPR)  
 Ruang Lingkup Penerapan : 1. Diisi dengan tugas SKPR sesuai dengan SOTK yang berlaku  
 2. Mengatakan Fungsi SKPR yaitu:  
 a. Diisi dengan fungsi SKPR sesuai dengan SOTK yang berlaku  
 b.  
 c.  
 d.  
 e.  
 f.  
 g.  
 h. dst.

Periode Penerapan : (Diisi dengan tahun penerapan manajemen risiko, misal tahun 2018)

1. Sasaran Organisasi

No	Daftar Sasaran	Keterangan
1	Diisi dengan sasaran strategis (SS) yang paling utama (terbaca) sesuai dengan perjanjian kinerja (PK) SKPR yang menginformasikan penerapan manajemen risiko.	Diisi dengan penjelasan masing-masing SS yang ada di dokumen Renstra SKPR
2		
3		
4		
5	dst	

2. Struktur Manajemen Risiko

No	Nama	Jabatan
1	Diisi dengan nama seluruh pegawai yang termasuk tim manajemen risiko (sesuai dengan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko SKPR beserta jabatan dalam tim manajemen risiko).	Penilik Risiko
2		
3		Koordinator Risiko
4		

3. Daftar Pemangku Kepentingan (stakeholder)

(Diisi dengan nama instansi internal dan eksternal BPK yang memiliki kepentingan dan berhubungan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh SKPR)

No	Stakeholder	Keterangan
1	Kementerian/Lembaga	Entitas Pemerintahan BPK
2	SPR/LEPRD	Penyedia Laporan
3	Prinsipal/Kepala/Manajemen	Entitas Pemerintahan BPK
4	Kepolisian Agung	Mitra PKN/APHI
5	KPK	Mitra PKN/APHI
6	Kepolisian	Mitra PKN/APHI
7	Kementerian Keuangan	Mitra Penyedia Anggaran
8	Kementerian PAN dan RB	Mitra Evaluasi RB dan SAMP
9	BPHN	Mitra Administrasi Kepegawaian
10	BUMN/BUMD	Entitas Pemerintahan BPK
11	dst.	

Inspektoral Utama : Badan Pemeriksa Keuangan 32

Gambar 3. Formulir Konteks Manajemen Risiko

Penjelasan Formulir Konteks Manajemen Risiko sebagai berikut:

- Unit Organisasi.  
 Diisi dengan nama SKPR. Sebagai Contoh: Piagam Level Badan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan; Level Eselon I → Inspektorat Utama atau Auditorat Keuangan Negara; dan Level Eselon II → Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan atau Perwakilan BPK Provinsi.
- Ruang lingkup penerapan.  
 Diisi dengan tugas SKPR sesuai dengan SOTK yang berlaku.
- Periode Penerapan.  
 Diisi dengan tahun penerapan MR dimaksud, misalnya Tahun 2019. Periode penerapan yang mencakup Identifikasi dan Mitigasi risiko harus diperbarui setiap tahun dan dipantau secara periodik yaitu setiap tiga bulan dikarenakan faktor yang mempengaruhinya bersifat dinamis seperti faktor internal (peraturan, sumber daya dalam organisasi, dan sebagainya) dan eksternal (Hukum, ekonomi, dan sebagainya).

4. Sasaran Organisasi.

Terdiri dari Sasaran Strategis (SS) dan Strategi sesuai dengan perjanjian kinerja (PK) SKPR.

5. Struktur Manajemen Risiko

Terdiri dari tiga tingkatan:

- a. Pemilik Risiko dalam hal ini Kepala SKPR.
- b. Koordinator Risiko atau Manajer Risiko merupakan pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala SKPR untuk mengkoordinir penerapan MR di lingkungannya (Pelaksana yang jabatannya satu level di bawah Kepala SKPR).
- c. Admin atau *Inputer* merupakan para pelaksana yang ditunjuk oleh Manajer Risiko untuk melakukan tugas-tugas administrasi (Jabatan admin bisa dari level staf).

6. Daftar Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Diisi dengan nama instansi baik internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan dan berhubungan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh SKPR).

7. Daftar regulasi, kebijakan, peraturan dan prosedur terkait.

Diisi dengan regulasi, dan lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh unit kerja yang bersangkutan.

C. Tahap ketiga adalah pengisian Manual Indikator Risiko Utama. Indikator Risiko Utama (IRU) adalah gejala-gejala sebelum suatu Risiko tersebut muncul. IRU digunakan untuk memantau risiko yang dianggap signifikan dan memerlukan penanganan.

Sebagai contoh: Pada saat menjemur Pakaian, maka salah satu risiko yang signifikan adalah Hujan. Maka IRU untuk risiko Hujan adalah Mendung.

Berikut adalah langkah-langkah pengisian Manual IRU:

1. Nama Risiko

Di Kolom ini, hanya di isi 1 nama risiko yang akan dipantau IRU nya.

2. Nama IRU

Pemilihan nama IRU dibuat agar singkat dan bisa merepresentasikan indikator yang dimaksud.

3. Deskripsi IRU

Untuk kolom ini, bisa dijelaskan secara lengkap pengertian indikator yang dipakai.

4. Batasan Nilai IRU

Di bagian ini, Nilai IRU akan dibuat batasan-batasan yang dibagi atas tiga bagian yaitu:

- Batas Aman: bisa disebut juga batas menengah.
- Batas Atas: Batas nilai maksimum dari IRU tersebut.
- Batas Bawah: Batas nilai minimum dari IRU yang dimaksud.

5. Formula

Merupakan rumus yang digunakan untuk menentukan nilai dari IRU.

6. Satuan Pengukuran

Satuan Pengukuran IRU dalam bentuk persentase

7. Unit Penanggung Jawab

Unit dalam SKPR yang bertanggung jawab dalam memantau IRU tersebut.

8. Unit Penyedia Data

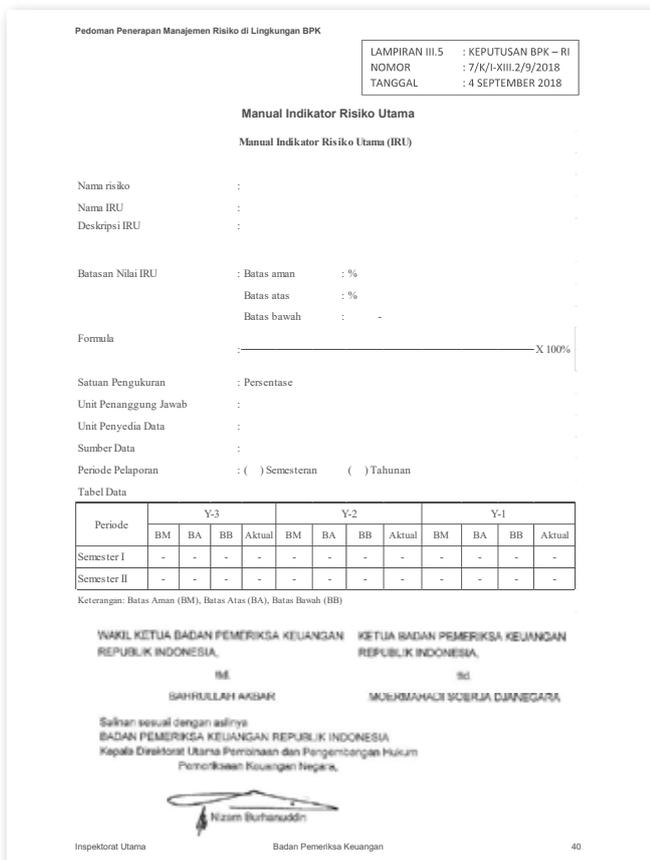
Merupakan unit yang menyediakan data bagi unit penanggung jawab dalam pemantauan IRU

9. Sumber data

Data yang digunakan untuk pemantauan IRU.

10. Periode Pelaporan

Dalam kolom ini, bisa memilih antara periode semesteran ataupun tahunan.



Gambar 4. Manual Indikator Risiko Utama

11. Tabel Data

Merupakan realisasi pemantauan Batasan Nilai IRU dalam 3 tahun terakhir.

D. Tahap selanjutnya adalah penyusunan Profil dan Peta Risiko (Lampiran III.6 – Formulir II. Profil dan Peta Risiko). Sebelum membahas lebih lanjut, tentunya penting bagi kita untuk mengetahui pengertian Risiko. Berdasarkan Pedoman MR, risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi. Seperti dijelaskan di edisi sebelumnya Tujuan organisasi yang dimaksud tercantum dalam Prinsip MR yaitu menciptakan dan melindungi nilai. Nilai tersebut adalah visi dan misi. Apabila diperkecil lingkup berdasarkan SKPR maka tujuan masing-masing SKPR adalah Sasaran Strategis dan Strategi yang tercantum dalam Perjanjian kinerja. Berikut adalah tatacara pengisian Formulir II:

**1. Sasaran Organisasi**

Diisi dengan Sasaran Strategis dan Strategis sesuai PK.

**2. Identifikasi Risiko**

Identifikasi risiko adalah suatu proses dalam menentukan risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan suatu organisasi. Risiko bisa berupa positif mau pun negatif. Khusus dalam hal ini, risiko diartikan sebagai kemungkinan kejadian yang berimplikasi negatif atau merugikan apabila terjadi. Tentu harus dibedakan secara jelas antara risiko dan masalah. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang merugikan. Sedangkan masalah adalah risiko yang sudah terjadi dan berulang. Untuk itu identifikasi perlu dilakukan secara cermat agar dihasilkan mitigasi atau rencana aksi penanganan risiko yang tepat sehingga bisa menghambat terjadinya risiko yang dimaksud. Identifikasi risiko dibagi 2 yaitu Risiko dan Kategori Risiko.

2.1. Untuk Risiko terbagi atas 4, yaitu:

a. Kejadian

Adalah sebuah peristiwa atau aktifitas dari risiko dimaksud.

b. Penyebab

Merupakan penyebab terjadinya suatu kejadian risiko.

c. Dampak

Merupakan akibat langsung yang timbul setelah suatu risiko terjadi.

d. Kapan Terjadinya.

Merupakan perkiraan kapan kemungkinan akan terjadinya risiko tersebut.

2.2. Kategori Risiko

Penentuan kategori berdasarkan penyebab. Berdasarkan Pedoman MR, kategori risiko dibagi 6, yaitu: Risiko kebi-

jakan, risiko kepatuhan, risiko hukum, Risiko kecurangan, risiko operasional dan risiko reputasi.

**3. Analisis Risiko**

Merupakan suatu analisa atas risiko untuk mengetahui tingkat besarnya risiko yang dapat menunjukkan besarnya pengaruh risiko terhadap pencapaian tujuan. Analisa risiko terdiri dari:

a. Sistem pengendalian yang dilakukan

Kolom ini bisa diisi dengan kebijakan, peraturan, Standard Operating Procedures (SOP), dll yang berasal dari internal maupun eksternal. Sebagai contoh: Juknis pemeriksaan, SPKN, UU, dan sebagainya.

b. Kemungkinan

Merupakan terjadinya "Penyebab" dalam setahun. Untuk menjawab Level kemungkinan dari Level 1-5, bisa lihat di Lampiran III.2 di bagian 5.A Kriteria Kemungkinan. Sebagai contoh: Apabila terjadi kurang dari 2 kali dalam setahun, maka level kemungkinannya Hampir Tidak Terjadi (1), demikian seterusnya.

c. Dampak

Di Lampiran III.2 di bagian 5.B Kriteria Dampak, di mana Level Dampak yang terdiri Level 1 – 5 bisa di tentukan dari area dampaknya. Apakah area Dampaknya termasuk Beban Keuangan Negara, Penurunan Reputasi, Sanksi pidana atau perdata, Kecelakaan kerja, Gangguan terhadap layanan organisasi, dan penurunan kinerja. Sebagai contoh, apabila dampaknya menyebabkan Cedera fisik dan Mental Sedang, maka merupakan kriteria dari kecelakaan kerja dan masuk ke Level Ke 3. Contoh lainnya adalah Suatu Kejadian Risiko menimbulkan dampak adanya pemberitaan negatif di media massa nasional dan international. Kejadian tersebut bisa dikategorikan level dampak 5. Demikian seterusnya.

d. Level Risiko dan Besaran Risiko

Untuk kolom ini, pengisiannya tergantung level kemungkinan dan level dampak. Sebagai contoh, Kejadian Risiko A berada pada Level Kemungkinan Hampir Tidak Terjadi (1) dan Level Dampak Sangat Signifikan (5) maka Besaran Risiko nya adalah 20. Apabila Besaran Risiko nya masuk dalam range 20-25, Level Risikonya dikategorikan Sangat Tinggi (5)

**4. Evaluasi Risiko**

Di dalam pedoman MR dijelaskan bahwa tujuan evaluasi risiko adalah membantu pengambilan keputusan berdasarkan *output* dari analisis risiko. Tahapan ini meliputi 3 bagian yaitu:

a. Prioritas Risiko.

Kejadian risiko akan diprioritaskan berdasarkan urutan Besaran Risiko, sehingga Besaran Risiko paling besar akan menjadi prioritas pertama.

- b. Keputusan penanganan risiko Pada kolom ini, akan dijawab dengan “Ya” atau “Tidak”. Hal ini didasarkan pada selera risiko (*Risk Appetite*) suatu organisasi. BPK menetapkan Selera Risiko bila Besaran Risiko antara 1-11. Apabila Besaran Risiko dikisaran 12-25, maka kolom ini akan dijawab “Ya”, kemudian akan diproses lebih lanjut.
- c. Indikator Risiko Utama (IRU) Penyusunan IRU didasarkan Informasi yang signifikan atau pun berdasarkan tanda-tanda (gejala) sebelum suatu kejadian risiko terjadi. IRU bisa diidentifikasi dari penyebab suatu kejadian risiko. Kolom IRU diisi dengan Nama dan Batasan Nilai. Batasan nilai dibagi menjadi 3, yaitu Batas Bawah (BB), Batas Aman (BM) dan Batas Atas (BA). Tatacara pengisian IRU dalam Formulir II ini, perlu dilakukan dengan menyusun Manual IRU untuk masing-masing kejadian risiko yang memerlukan penanganan.

Dalam Sesi pertama ini, hanya disajikan 4 tahap implementasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK. Perlu diketahui bahwa Manajemen Risiko tidak memiliki suatu bentuk baku (baik dalam format, identifikasi dan mitigasi profil risiko). Hal ini dikarenakan, Manajemen Risiko bersifat fleksible dan dinamis, akan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi.

Tahap paling sulit dalam Manajemen Risiko adalah mengidentifikasi risiko. Dengan mengetahui ancaman-ancaman yang dihadapi oleh unit organisasi, tentu dapat di evaluasi lebih lanjut bagaimana langkah mitigasi risiko yang tepat, yang sesuai dengan kemampuan organisasi. Selain penjelasan di atas, berikut disajikan salah satu contoh risiko yang terdapat di Inspektorat Utama.

Gambar 4. Manual Indikator Risiko Utama

## MANUAL Indikator Risiko Utama (IRU)

- Nama Risiko : Terjadinya pelanggaran disiplin
- Nama IRU : Informasi Dugaan Pelanggaran
- Deskripsi IRU : Adanya informasi atau Laporan terkait pelanggaran disiplin oleh pegawai di Inspektorat Utama.
- Batasan Nilai IRU : Batas Aman : 2 Kali  
Batas Atas : 5 Kali  
Batas Bawah : 0
- Formula : -
- Satuan Pengukuran : Kali
- Unit Penanggung Jawab : Inspektorat Penegakan Integritas
- Unit Penyedia Data : Bidang Penegakan Integritas II
- Sumber Data : *Whistle Blowing System*
- Periode Pelaporan : ( X ) Semesteran ( ) Tahunan
- Tabel Data

Periode	Y-3*				Y-2*				Y-1*			
	BM	BA	BB	Aktual	BM	BA	BB	Aktual	BM	BA	BB	Aktual
Semester I	0	2	5		0	2	5		0	2	5	
Semester II	0	2	5		0	2	5		0	2	5	

**Keterangan:**

Batas Aman (BM), Batas Atas (BA), Batas Bawah (BB)

\* Angka di Tabel Data merupakan angka perkiraan saja. Bukan untuk rujukan.



<<<

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara bersepeda dari Kantor Pusat sampai Ba-diklat Kalibata, 5 Juli 2019.



<<<

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, memberikan sambutan dalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai BPK RI di Auditorium Gedung Tower BPK RI, 23 Juli 2019.



<<<

Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dihadiri oleh Anggota I BPK RI Agung Firman Sampurna, 25 Juni 2019.



>>>

Para penerima hadiah di Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai BPK RI di Auditorium Gedung Tower BPK RI, 23 Juli 2019.



>>>

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar berfoto bersama peserta Trofeo Friendly di Rugby Field, Senayan, 22 Juni 2019.



>>>

Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri dihadiri oleh Anggota I BPK RI Agung Firman Sampurna, 22 Juni 2019.





<<<

Rapat Kerja Teknis Pemeriksaan Semester II Tahun 2019 di Lingkungan AKN I dihadiri oleh Anggota I BPK RI Agung Firman Sampurna, di Auditorium BPK RI, 18 Juli 2019.



<<<

Workshop Implementasi Penegakkan Kode Etik BPK dihadiri Agus Joko Pramono sebagai Ketua MKKE, Isma Yantun sebagai Anggota MKKE, 10 Juli 2019.



<<<

Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 oleh Anggota IV BPK Rizal Djalil.



>>>

Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2018 oleh Anggota IV BPK Rizal Djali.



>>>

Anggota VI Harry Azhar Azis dalam acara Sosialisasi "Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara" di Kendari, Sulawesi Tenggara, 5 Agustus 2019.



>>>

Kunjungan Anggota VI BPK RI untuk Meninjau Pelayanan BPJS Kesehatan pada Pasien Cuci Darah di Ruang Hemodialis RS Stella Maris Makassar, Sulawesi Selatan.



Pimpinan dan  
Keluarga Besar BPK RI  
Mengucapkan



*Selamat Hari Raya  
Idul Adha 1440 H*



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# **74<sup>TH</sup>** **DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA**

---

17 AGUSTUS 1945 - 17 AGUSTUS 2019

**SDM UNGGUL  
INDONESIA MAJU**